

BPK Siap Pertajam
Pemeriksaan

Hal 4

Bersinergi Berantas Korupsi

Hal 9

Ketua BPK Tekankan Pentingnya
Pengelolaan Risiko

Hal 40



73 TAHUN BPK





Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) genap berusia 73 tahun pada 1 Januari 2020. Di usia barunya, BPK bertekad untuk meningkatkan kontribusi dalam mengawal harta negara. Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam rapat koordinasi pelaksana BPK pada 19 Desember 2019 menyatakan, BPK ingin mempertajam pemeriksaan. BPK akan meningkatkan fokus perhatian pemeriksaan ke akun-akun berisiko tinggi, baik di level kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Arahan Ketua BPK tersebut jadi salah satu pembahasan utama *Warta Pemeriksa* edisi Januari 2020 dalam rubrik BPK Bekerja. Dalam rubrik ini, dibahas pula hasil pemeriksaan BPK terkait PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang kini dirundung permasalahan gagal bayar polis asuransi nasabah.

Dalam rubrik Sorotan, tim redaksi menampilkan tulisan mengenai serangkaian acara yang digelar BPK dalam memperingati HUT ke-73. Redaksi juga menyajikan rubrik Sudut Pandang yang berisikan harapan-harapan para pemangku kepentingan terhadap BPK di usia 73 tahun.

Sebagai bahan inspirasi, *Warta Pemeriksa* kembali menyajikan rubrik Bisnis dan Niaga. Kali ini menceritakan tentang kisah sukses pegawai BPK Perwakilan Sumatera Barat lewat bisnis rendang kemasan. Produk yang ia jual sukses menembus pasar luar negeri.

Masih banyak informasi lain yang redaksi sajikan pada *Warta Pemeriksa* edisi Januari 2020 ini. Kami juga menerima berbagai masukan dan tulisan dari seluruh pembaca, termasuk para pegawai BPK. Selamat membaca. ●

TIM EDITORIAL

Pengarah

Agung Firman Sampurna
Agus Joko Pramono
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab :

Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

Sekretariat

Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Sudarman

Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

BPK SIAP PERTAJAM PEMERIKSAAN

4 BPK akan meningkatkan fokus pada 2020 ke akun-akun berisiko tinggi baik di level kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

9 BERSINERGI BERANTAS KORUPSI

10 BPK PERLUAS SEBARAN SERTIFIKASI CSFA

SEMANGAT DAN TEKAD BPK DI USIA 73 TAHUN

13 Ketua BPK menilai, ekspektasi masyarakat dan pemangku kepentingan atas peran BPK meningkat dalam beberapa bulan terakhir, khususnya setelah BPK kembali tampil di publik menyampaikan komitmen mengungkap secara komprehensif skandal Jiwasraya.

16 MEMBANGUN KEBERSAMAAN LEWAT *FAMILY GATHERING*

TANTANGAN IMPLEMENTASI SDGS

18 Tantangan selanjutnya dalam implementasi SDGs terletak pada kemampuan negara memilih target SDGs yang paling signifikan.

20 **AGUS JOKO PRAMONO**, WAKIL KETUA BPK “TERUS LAKUKAN PERUBAHAN”

24 HARAPAN KEPADA BPK

27 MEMBANGUN INTEGRITAS DAN KEJUJURAN LEWAT CAFE BASAMO

29 KECERDASAN EMOSI UNTUK PRIBADI YANG BERINTEGRITAS, INDEPENDEN DAN PROFESIONAL

HASIL PEMERIKSAAN JIWASRAYA

6 Dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT AJS, BPK mendapat permintaan Penghitungan Kerugian Negara dari Kejaksaan Agung.



33 PERKUAT PENGAMANAN DENGAN TEKNOLOGI

35 RANDANG TIGOKA, RENDANG KEMASAN YANG MENDUNIA

37 BPK PERKUAT UPAYA PENCEGAHAN

38 PENEGAKAN KODE ETIK BUTUH DUKUNGAN SEMUA PIHAK

BPK-KOMISI XI DPR BAHAS RISIKO PENGELOLAAN APBN

39 FGD ini ditujukan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

40 KETUA BPK TEKANKAN PENTINGNYA PENGELOLAAN RISIKO

42 PEMERIKSAAN BUMN DI BAWAH NAUNGAN KEMENKEU

44 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN BPK

47 BERITA FOTO

BPK Siap Pertajam Pemeriksaan

BPK akan meningkatkan fokus pada 2020 ke akun-akun berisiko tinggi baik di level kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar rapat koordinasi (rakor) pelaksana BPK yang kedua Tahun 2019 pada Kamis (19/12) di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Rapat tersebut merupakan bagian dari persiapan menyongsong rencana strategis (Renstra) BPK 2020-2024 dengan visi "Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menegaskan, dengan visi baru dan pemerintahan baru yang sudah terbentuk, BPK siap mempertajam pemeriksaannya.

"Pemerintahan baru sudah terbentuk jadi saya katakan kita akan *back to standard*. Kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara tajam terhadap berbagai hal," kata Agung setelah membuka rakor.



● Ketua BPK membuka Rakor Pelaksana BPK.

Agung mengatakan, akan meningkatkan fokus perhatian pemeriksaan pada 2020 ke akun-akun berisiko tinggi baik di level kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Fokus tersebut yakni terhadap pinjaman daerah, belanja bantuan sosial dan hibah, belanja modal, dan manajemen kas.

Terkait dengan pinjaman daerah,

selain prosedur-prosedur standar yang sudah umum dilakukan, pemeriksa perlu mencermati variasi praktik pinjaman daerah yang lain.

"Jangan hanya berpedoman pada definisi formal pinjaman saja. Contoh variasi lain dari pinjaman daerah adalah pemerintah melakukan suatu pekerjaan yang belum dianggarkan pada tahun berjalan, kemudian diakui sebagai pinjaman pada tahun mendatang," kata Agung.

Akun berikutnya yang perlu diperhatikan, kata Agung, adalah belanja hibah dan bantuan sosial (bansos). Hal itu terutama perlu dicermati dengan adanya Pemilu serentak di tahun anggaran 2019. Asersi laporan keuangan yang paling signifikan untuk akun belanja hibah dan bansos adalah asersi keterjadian bahwa transaksi benar telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.



● Pimpinan dan para peserta Rakor Pelaksana BPK.



● Ketua BPK memberikan pengarahan tentang Rakor Kebijakan Pemeriksaan kepada peserta.

“Pemeriksa perlu memastikan bahwa pemberian hibah dan bansos tidak dilakukan secara terus menerus kepada pihak yang sama, dokumen pertanggungjawaban lengkap, dan memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” kata Agung.

Terkait belanja modal, Agung menyampaikan, uji petik tidak harus selalu diarahkan pada belanja modal bernilai besar. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menutup peluang *fraud* pada proyek belanja modal bernilai rendah.

BPK juga akan meningkatkan fokus perhatian terhadap manajemen kas. Agung mengatakan, sama halnya dengan belanja modal, seluruh asersi laporan keuangan terkait akun kas, penting untuk dicermati pemeriksa.

Selain pengujian pengendalian dan pengujian substantif yang rutin dilaksanakan pemeriksa, ada satu prosedur khusus yang perlu diterapkan untuk pemeriksaan tahun 2020.

“Pelaksanaan *cash opname* secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada entitas. Hal ini dilakukan untuk benar-benar mencapai tujuan utama dari *cash opname* tersebut, yaitu untuk melihat kualitas manajemen kas yang diterapkan

oleh entitas,” kata Agung.

Pada bidang nonpemeriksaan, BPK akan melanjutkan implementasi Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF) yang telah dimulai tahun lalu. Agung berharap, SAI PMF dapat dilembagakan sebagai perangkat penilaian kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek yang ada dalam SAI PMF adalah komunikasi. Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “Akuntabilitas untuk Semua” atau “Accountability for All”. Hal ini dimaksudkan agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

“Saya mengharapkan slogan ini dapat diwujudkan, melalui berbagai kegiatan,” kata Agung.

Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksana BPK Tahun 2019 diselenggarakan sebagai suatu wadah koordinasi dan forum pertemuan seluruh satuan kerja (satker) pelaksana BPK dalam menentukan prioritas kegiatan BPK sesuai dengan kebijakan/strategi/rencana dan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan kerja di BPK. Dengan adanya strategi dan kebijakan yang lebih matang, melalui penyelenggaraan Rakor diharapkan rencana kegiatan Pelaksana BPK tahun 2020, baik itu Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kegiatan Sekretariat dan Penunjang (RKSP) akan lebih terarah. ●

”

Pemerintahan baru sudah terbentuk jadi saya katakan kita akan *back to standard*. Kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara tajam terhadap berbagai hal.

HASIL PEMERIKSAAN Jiwasraya

Dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT AJS, BPK mendapat permintaan Penghitungan Kerugian Negara dari Kejaksaan Agung.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan dua pemeriksaan dalam kurun waktu 2010-2019 atas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau PT AJS yang kini mengalami permasalahan gagal bayar polis asuransi nasabah. Kedua pemeriksaan tersebut adalah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Investigatif (Pendahuluan).

PDTT dilakukan pada 2016 terkait pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan biaya operasional pada Jiwasraya tahun 2014-2015. Sementara, Pemeriksaan Investigatif (Pendahuluan) dilakukan sejak 2018.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, ada 16 temuan dalam PDTT tahun 2016. Temuan-temuan tersebut, antara lain, investasi pada saham TRIO, SUGI, dan LCGP Tahun 2014 dan 2015 tidak didukung kajian usulan penempatan saham yang memadai. Selain itu, PT AJS berpotensi menghadapi risiko gagal bayar atas transaksi pembelian *medium term note* (MTN) pada PT Hanson Internasional (HI).

PT AJS juga kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki dan terdapat penempatan saham secara tidak langsung di satu perusahaan yang berkinerja kurang baik.

"Untuk menindaklanjuti hasil PDTT tahun 2016 tersebut, BPK melakukan Pemeriksaan Investiga-

tif Pendahuluan yang dimulai pada 2018. Hasil pemeriksaan investigatif menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan produk JS Saving Plan dan investasi," kata Agung dalam konferensi pers bersama Kejaksaan Agung, di kantor pusat BPK, Jakarta, Rabu (8/1).

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif (Pendahuluan), permasalahan di PT AJS telah terjadi sejak lama. Pada 2006, PT AJS diketahui melakukan rekayasa akuntansi atau *window dressing*. "Laba yang dibukukan PT AJS pada 2006 adalah laba semu. Perusahaan sebenarnya telah mengalami kerugian," ungkap Agung.

PT AJS juga menyatakan membukukan laba sebesar Rp360,3 miliar pada 2017. Akan tetapi, BPK memberikan opini *adverse* atau tidak wajar atas laporan keuangan PT AJS karena adanya kecurangan pencadangan sebesar Rp7,7 triliun. Jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan, seharusnya perusahaan menderita kerugian.

Selanjutnya pada 2018, PT AJS membukukan kerugian (*unaudited*) sebesar Rp15,3 triliun dan sampai dengan September 2019 diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp13,7 triliun. Pada posisi 30 November 2019, PT AJS diperkirakan mengalami *negative equity* sebesar Rp27,2 triliun.

Kerugian tersebut terjadi terutama karena PT AJS menjual produk JS Saving Plan dengan biaya



● Konferensi pers BPK dan Kejaksaan Agung terkait Jiwasraya (8/1).



Untuk menindaklanjuti hasil PDDT tahun 2016 tersebut, BPK melakukan Pemeriksaan Investigatif Pendahuluan yang dimulai pada 2018. Hasil pemeriksaan investigatif menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan produk JS Saving Plan dan investasi.

dana yang sangat tinggi di atas bunga obligasi dan deposito. “Hal ini dilakukan secara masif sejak tahun 2015,” kata Agung.

Ia menambahkan, dana dari JS Saving Plan tersebut diinvestasikan pada instrumen saham dan reksa dana berkualitas rendah, sehingga menimbulkan *negative spread* yang mengakibatkan tekanan likuiditas pada PT AJA. “Inilah yang pada akhirnya menimbulkan gagal bayar.”

Produk JS Saving Plan merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi di Jiwasraya sejak 2015. Produk ini merupakan produk simpanan dengan jaminan *return* atau bunga yang sangat tinggi dengan tambah-

an manfaat asuransi.

Pada penjualan JS Saving Plan, BPK menemukan sejumlah penyimpangan. Beberapa di antaranya adalah penunjukan pejabat kepala pusat *bancassurance* senior yang tidak sesuai ketentuan, pengajuan *cost of fund* (COF) langsung kepada direksi tanpa melibatkan divisi terkait, penetapan COF tidak mempertimbangkan kemampuan Jiwasraya untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk menutup biaya atas produk asuransi yang dijual.

Kemudian, dalam pemasaran produk asuransi JS Saving Plan diduga terjadi konflik kepentingan karena pihak-pihak terkait di PT AJA mendapatkan *fee* atas penjualan produk tersebut.

Penghitungan Kerugian Negara

Dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT AJS, BPK mendapat permintaan Penghitungan Kerugian Negara dari Kejaksaan Agung (Kejakgung). Permintaan itu disampaikan Kejaksaan melalui Surat tertanggal 30 Desember 2019. BPK juga mendapat permintaan dari DPR dengan Surat Nomor PW/19166/DPR RI/XI/2019 tanggal 20 November 2019 untuk melakukan PDTT atas permasalahan PT AJS.

“BPK saat ini terus bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung untuk dapat menghitung nilai kerugian negara dalam kasus tersebut dan direncanakan dapat selesai dalam waktu paling cepat dua bulan. BPK akan sepenuhnya mendukung pihak

Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum pada kasus PT AJS,” kata Agung.

Agung menambahkan, selain melakukan penghitungan kerugian negara, BPK juga mulai melakukan pemeriksaan investigatif pada PT AJS. Tujuan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya ketidakpatuhan yang berindikasi kecurangan (*fraud*), serta indikasi kerugian negara dan/atau unsur pidana dalam pengelolaan Jiwasraya.

“Kami tidak boleh gegabah dan BPK sangat membantu sekali dalam rangka pengungkapan kasus ini. Insya Allah dalam waktu dua bulan masyarakat sudah dapat mengetahui siapa para pelaku yang melakukan kasus yang sangat besar ini,” kata Jaksa Agung, Burhanuddin. ●

SEJUMLAH TEMUAN BPK TERKAIT

Jiwasraya melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang berkualitas rendah yang pada akhirnya mengalami penurunan nilai dan tidak liquid. Saham-saham tersebut antara lain BJBR, SMBR, dan PTPRO. Indikasi kerugian negara akibat transaksi tersebut diperkirakan Rp 4 triliun.

Per 30 Juni 2018, Jiwasraya memiliki 28 produk reksa dana. Sebagian besar berupa saham berkualitas rendah dan tidak liquid.

Analisis pembelian dan penjualan saham diduga dilakukan secara proforma dan tidak didasarkan pada data yang valid dan objektif.

Rencana *subscription* oleh manajer investasi tidak dilakukan secara memadai dan diduga dibuat secara proforma. Tujuannya agar manajer investasi terlihat seolah-olah memiliki kinerja yang baik sehingga dapat dipilih oleh PT Jiwasraya untuk menempatkan investasi.



Investasi reksa dana memiliki *underlying* saham dan *medium term note* berkualitas rendah.

Melakukan kegiatan jual beli saham dalam waktu yang berdekatan untuk menghindari pencatatan *unrealized loss*.

Kepemilikan atas saham tertentu melebihi batas maksimal, yaitu di atas 2,5 persen.

Pihak yang diajak bertransaksi saham oleh manajemen Jiwasraya adalah grup yang sama sehingga diduga ada dana perusahaan dikeluarkan melalui grup tersebut.

Jual-beli saham dilakukan pihak-pihak terafiliasi dan harga jual-beli tidak mencerminkan harga sebenarnya.

Jual-beli saham diduga dilakukan dengan pihak-pihak tertentu secara negosiasi agar bisa memperoleh harga tertentu yang diinginkan.

Investasi langsung terhadap saham-saham yang tidak liquid dengan harga yang tidak wajar.

Indikasi kerugian sementara akibat penurunan nilai saham pada reksa dana diperkirakan sekitar Rp6,4 triliun.



Bersinergi Berantas Korupsi

Kerja sama BPK dan KPK akan memperkuat semangat pemberantasan korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bersinergi dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Kedua lembaga pun telah memperbarui nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Ketua KPK Firlil Bahuri di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (7/1).

Ketua BPK menjelaskan, kesepakatan bersama yang dijalin kedua lembaga berkaitan dengan tindak lanjut pemeriksaan BPK terkait kerugian negara. Kemudian, pembaruan prosedur penghitungan kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru yaitu UU Nomor 19 tahun 2019.

"Kerja sama ini juga langkah kami untuk mendukung KPK dalam pencegahan maupun penindakan korupsi," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Selasa (7/1).

Agung menjelaskan, kerja sama ini memperbarui MoU sebelumnya yang pernah dilakukan antara kedua lembaga pada 2006. Selain pembaruan terkait tindak lanjut penegakan hukum hasil pemeriksaan BPK yang terindikasi merugikan negara dan unsur pidana kepada KPK, ada beberapa hal yang tercantum dalam kerja sama ini. Yaitu tindak lanjut terhadap



- Pimpinan BPK dan Pimpinan KPK akan bersinergi memberantas korupsi.

permintaan KPK kepada BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara, pencegahan tindak pidana korupsi, pertukaran informasi dan koordinasi.

Kesepakatan itu juga membahas kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap kerugian negara dan unsur pidana. Sedangkan KPK, berwenang menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi.

Kerja sama itu juga mengatur bahwa apabila BPK menemukan kerugian negara dan pidana, maka BPK menyerahkan hasil pemeriksaan tertulis kepada KPK. Sementara itu, terkait penghitungan kerugian negara, KPK dapat meminta BPK untuk melakukan penghitungan dengan dokumen pendukung dari KPK.

Sedangkan terkait keterangan ahli, KPK dapat meminta BPK menunjuk ahli untuk didengar keterangannya terkait hasil pemeriksaan BPK.

Kedua lembaga juga bekerja sama dalam pencegahan korupsi melalui sosialisasi serta pendidikan dan pelatihan di antaranya bagi SDM KPK dalam kemampuan audit.

Di lokasi yang sama, Ketua KPK Firlil Bahuri mengatakan, kerja sama kedua lembaga akan memperkuat semangat pemberantasan korupsi. KPK dan BPK memperbarui kerja sama karena tenggang waktu kerja sama sebelumnya sudah berakhir.

"Kerja sama ini penting karena banyak tugas ke depan yang harus kami selesaikan tanpa mengesampingkan peran KPK dan BPK," katanya.

Penandatanganan kerja sama ini turut dihadiri para pimpinan kedua lembaga. ●

BPK Perluas Sebaran Sertifikasi CSFA



● Foto bersama peserta *Quality Control* dan *Quality Assurance* dengan Ketua BPK RI.

CSFA diharapkan turut digunakan oleh aparat pengawas internal pemerintah dan kantor akuntan publik.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna berharap, seluruh pemeriksa di BPK dapat mengantongi Certified State Finance Auditor (CSFA) atau Sertifikasi Pemeriksa Keuangan Negara. Menurut Agung, hal itu merupakan bagian dari upaya melembagakan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) BPK khususnya di bidang keuangan negara.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), seorang pemeriksa harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk menjalankan tugas pemeriksaan. Agung mengatakan, sertifikasi tersebut tidak hanya dapat diraih oleh pemeriksa BPK tapi juga pihak eksternal.

"Kita berharap itu (CSFA) akan digu-

nakan tidak hanya oleh BPK tapi juga aparat pengawas internal pemerintah dan juga kantor akuntan publik yang kita *hire* untuk dan atas nama BPK," kata Agung di Jakarta, Kamis (19/12).

Salah satu kekhususan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI adalah lembaga tinggi yang berwenang memeriksa pengelolaan keuangan negara. Sehingga, BPK pun berkewajiban untuk menjamin pemeriksanya memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam pemeriksaan.

Agung mengatakan, BPK telah menyiapkan seluruh kebutuhan sertifikasi tersebut mulai dari diklat, materi, uji kompetensi, hingga sertifikasinya.

Kepala Pusat Standarisasi dan Evaluasi Badan Diklat PKN BPK Gunarwanto mengatakan, kompetensi teknis pemeriksa harus dibuktikan melalui sertifikasi profesi.

"Praktik ini berlaku secara internasional, bahwa kompetensi teknis di bidang apa pun harus dibuktikan lewat sertifikasi profesi," kata Gunarwanto.

Berdasarkan peraturan dan *best practice* yang berlaku di seluruh dunia,

BPK menggagas adanya Certified State Finance Auditor (CSFA) atau Sertifikasi Pemeriksa Keuangan Negara. Awalnya ada beberapa alternatif nama sertifikasi. Namun dengan pertimbangan agar di waktu mendatang bisa diterima secara internasional, maka pada akhirnya BPK memilih menggunakan sebutan CSFA bagi mereka yang resmi memiliki sertifikasi profesi di bidang pemeriksaan keuangan negara.

BPK memilih bahasa asing agar sertifikasi CSFA nanti bisa mendunia dan membuat negara-negara lain tertarik untuk mengikuti CSFA. "Kami sempat menjajaki dan melihat pola-pola sertifikasi di organisasi lain, seperti IAI, IIA, CFE, CFA, dan lain-lain. Pola-pola itu kami pelajari, selanjutnya pola yang cocok dengan kondisi di BPK, kami terapkan dalam merancang dan menerapkan sertifikasi CSFA," ucap dia.

Sertifikat CSFA memiliki posisi yang istimewa karena akan menjadi persyaratan bagi pemeriksa untuk bisa menandatangani hasil pemeriksaan dalam lingkup keuangan negara. Nantinya, penandatanganan hasil pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu harus bersertifikat CSFA. Dengan adanya persyaratan ini, maka setiap hasil pemeriksaan diharapkan memiliki kualitas yang sama.

"Jadi standar kualitas akan sama, baik pemeriksa yang berasal dari BPK maupun yang dari luar. Bahkan ke depan sertifikasi tak hanya untuk lingkungan internal di Indonesia, namun juga pemeriksa sektor publik dari luar negeri, khususnya di negara-negara yang BPK-nya tergabung dalam organisasi BPK sedunia dan regional yang belum ada sertifikasi profesi," ucap dia.



● Penyerahan gelar CSFA kepada Pimpinan AKN I, II, dan VII BPK oleh Ketua BPK.

Orasi Ilmiah

Dalam pelaksanaan rapat koordinasi (Rakor) Pelaksana BPK Tahun 2019 turut dilakukan penyerahan gelar CSFA kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Hendra Susanto, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II BPK Pius Lustrilanang, dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK Daniel Lumban Tobing serta para pejabat pimpinan tinggi pratama.

Sebelum diberikan gelar, para pejabat menyampaikan orasi ilmiahnya di hadapan peserta rakor. Hendra Susanto menyampaikan orasi berjudul "Peningkatan Kompetensi Profesional Pemeriksa BPK dalam Melakukan Pemeriksaan Infrastruktur".

Hendra menyampaikan, terdapat beberapa temuan BPK terkait konstruksi yakni kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, denda keterlambatan pekerjaan, dan spesifikasi barang/jasa yang tidak sesuai kontrak serta bernilai material.

"Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) pemilik kegiatan konstruksi belum berjalan dengan baik. Di sisi lain, gugatan-gugatan atas hasil pemeriksaan BPK mulai bermunculan dalam beberapa tahun terakhir," kata Hendra.

Menurut Hendra, tingginya risiko ketidakpatuhan material dan risiko pemeriksaan menuntut BPK khususnya tim pemeriksa untuk memperkuat strategi pemeriksaan bidang infra-



Diperlukan strategi pemeriksaan secara mikro yang menekankan kepada perbaikan kompetensi pemeriksa dan prosedur pemeriksaan.

struktur khususnya bidang konstruksi. Selain itu, menurutnya, diperlukan strategi pemeriksaan secara mikro yang menekankan kepada perbaikan kompetensi pemeriksa dan prosedur pemeriksaan.

"Pemeriksa BPK didorong untuk memiliki kapasitas dalam pemeriksaan infrastruktur melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi serta pada harapan penugasan yang lebih tinggi dapat menggunakan tenaga ahli sesuai pengaturan dalam SPKN. Selain itu, implementasi *talent pool* diperlukan segera untuk dapat memenuhi kebutuhan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan infrastruktur," kata Hendra.

Sementara itu, Pius Lustrilanang menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Risiko Pengelolaan Utang Negara dan Pengembangan Strategi Pemeriksaan dalam Mendorong Terwujudnya Kesi-

nambungan Fiskal".

Menurut Pius, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif atas permasalahan pengelolaan utang pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka masih diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih spesifik dengan melibatkan seluruh satuan kerja pemeriksaan. Pemeriksaan-pemeriksaan yang masih perlu dilakukan, antara lain pemeriksaan atas strategi dan implementasi program pemerintah dalam pengembangan pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Selain itu, perlu ada pemeriksaan atas strategi dan implementasi program pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan pajak. "Hal ini mengingat rendahnya pendapatan perpajakan yang ditunjukkan dengan *tax ratio* rendah dan tidak sejalan dengan pertumbuhan PDB dan pertumbuhan utang," kata Pius.

Pius juga mendorong adanya pemeriksaan atas pemanfaatan utang pemerintah untuk belanja produktif. Pemeriksaan ini diperlukan untuk menilai apakah utang pemerintah telah dimanfaatkan dengan optimal dan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait pinjaman proyek dan *project based sukuk* (PBS).

Kemudian, Daniel Lumban Tobing menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Strategi Pemeriksaan BPK untuk Meningkatkan Nilai Tambah BUMN". Daniel menyampaikan, total aset BUMN per Desember 2018 mencapai Rp8.117,6 triliun dengan laba sebesar Rp143,3 triliun. Meski begitu, ujarnya, masih terdapat beberapa masalah yang terjadi di BUMN seperti soal sinergi antarbadan usaha, fokus pada inti bisnis, dan persoalan kecurangan atau *fraud* seperti yang sedang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Khusus dalam pemeriksaan BUMN, BPK harus mengembangkan strategi pemeriksaan untuk meningkatkan nilai tambah BUMN terutama dalam hal infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi," kata Daniel. ●



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

*Semakin mudah
mengakses informasi melalui*



BPK RI Official



www.bpk.go.id



@bpkri



@bpkriofficial



Tugas BPK

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Semangat dan Tekad BPK di Usia 73 Tahun

Ketua BPK menilai, ekspektasi masyarakat dan pemangku kepentingan atas peran BPK meningkat dalam beberapa bulan terakhir, khususnya setelah BPK kembali tampil di publik menyampaikan komitmen mengungkap secara komprehensif skandal Jiwasraya.



● Para Pimpinan BPK melaksanakan upacara peringatan HUT BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) genap berusia 73 tahun pada 1 Januari 2020. Di usia barunya, BPK bertekad meningkatkan kontribusinya dalam mengawal harta negara.

Slogan baru pun telah diluncurkan. BPK kali ini mengusung slogan *"Accountability for All"* atau Akuntabilitas untuk Semua. Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam upacara per-

ingatan hari ulang tahun (HUT) ke-73 BPK di halaman utama kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (20/1), mengatakan, slogan tersebut bertujuan memperluas makna akuntabilitas.

"Secara filosofis, slogan ini bermaksud memperluas makna akuntabilitas, dari bermakna sempit pada akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, diperluas menjadi nilai dan budaya yang ditumbuhkan dalam sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,"

kata Ketua BPK dalam sambutannya.

Sesuai tema HUT ke-73, yaitu "Bersatu Padu, BPK Maju", Ketua BPK meminta seluruh insan BPK selalu solid dan bersinergi dalam menjalankan tugas. Apalagi, BPK melalui Rancangan Renstra BPK 2020-2024 telah menetapkan visi untuk menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Ketua BPK mengingatkan, BPK memiliki tanggung jawab yang besar karena total belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diaudit mencapai Rp3.146,73 triliun. Jumlah itu belum termasuk anggaran lembaga lainnya seperti Badan Pengelola Keuangan Haji, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Juga tidak termasuk keuangan negara yang dipisahkan, yaitu perusahaan BUMN. Bila semua entitas BPK digabungkan, setiap tahun BPK telah melakukan *assurance of accountability* atas pengelolaan keuangan negara sekitar Rp4.000 triliun.

Ketua BPK menegaskan, dibutuhkan integritas, profesionalisme, dan independensi yang kuat untuk mengemban tanggung jawab yang besar tersebut. "Dan penting untuk ditegaskan bahwa BPK bukanlah lembaga stempel WTP. Pencapaian opini WTP memang sedikit banyak dipengaruhi BPK sebagai auditor, tapi seharusnya tidak menjadi bagian dari kinerja BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang independen," ujar Ketua BPK.

Prestasi BPK sebagai lembaga pemeriksa adalah apabila dapat merampungkan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan, melalui *quality control* dan *quality assurance* yang ketat. Kemudian, mengungkap permasalahan signifikan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan negara dari entitas yang diperiksa.

Ketua BPK menilai, ekspektasi



● Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya.

masyarakat dan pemangku kepentingan atas peran BPK meningkat dalam beberapa bulan terakhir, khususnya setelah BPK kembali tampil di publik menyampaikan komitmen mengungkap secara komprehensif skandal Jiwasraya melalui pemeriksaan investigatif dan mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan Penghitungan Kerugian Negara atas kasus tersebut.

"Namun harus disadari oleh kita semua, bahwa betapapun besarnya tanggung jawab dan ekspektasi masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap BPK, ada keterbatasan yang harus direspons, baik dalam hal anggaran, sarana dan prasarana, maupun kuantitas SDM," ucap dia.

Keterbatasan itu perlu direspons dengan membangun dan memperkuat kebersamaan di BPK. Hal ini pula yang melandasi BPK mengusung tema "Bersatu Padu, BPK Maju" dalam HUT ke-73. Dengan semangat persatuan, setiap unit kerja didorong bersinergi untuk menghasilkan energi besar dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas BPK.

Dalam sambutannya, Ketua BPK juga memaparkan sejumlah pencapaian yang telah diraih BPK. Salah satunya terkait pembangunan Zona Integritas. Pada 2019, Auditorat Utama Investigasi, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

BPK juga berperan sangat aktif dalam proses penegakan hukum, penindakan tindak pidana korupsi melalui pemeriksaan investigasi, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli. Sepanjang 2019, BPK berhasil menyelesaikan 7 laporan hasil pemeriksaan (LHP) investigasi, 65 LHP investigasi untuk Penghitungan Kerugian Negara, dan membantu 75 kasus pemberian keterangan ahli.

Selain berhasil merampungkan tugas konstitusionalnya, BPK aktif terlibat dalam organisasi pemeriksa dunia yaitu International Supreme Audit Institution (Intosai). BPK terlibat dalam kegiatan kelompok kerja (*working group*) yang dibentuk untuk menghasilkan standar atau pedoman pemeriksaan, maupun menginisiasi dan terlibat dalam pelaksanaan audit dengan tema-tema strategis, salah satunya pemeriksaan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. BPK juga aktif dalam organisasi regional pemeriksa eksternal seperti ASOSAI, bahkan memelopori pendirian ASEANSAI sekaligus dipercaya memimpin pada periode pertama.



● Upacara HUT ke-73 BPK RI di Kantor Pusat BPK, Jakarta (20/1).





● Syukuran HUT ke-73 BPK RI.



● Ketua BPK RI

“Bahkan di akhir 2019, kita terpilih sebagai auditor eksternal International Maritime Organization (IMO). Kebanggaan itu, tidak saja karena untuk mendapatkannya, BPK harus berkompetisi dengan negara sebesar Inggris dan Italia, tetapi juga menambah deretan pengakuan internasional, setelah sebelumnya mandat auditor eksternal juga diberikan oleh IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional) dan IACA (Akademi Anti Korupsi),” ungkap dia.

Bukan hanya itu. Pada akhir tahun lalu, BPK juga meluncurkan program Certified State Finance Auditor (CSFA) sebagai salah satu bentuk penilaian dan pengakuan profesional pemeriksa keuangan negara. Tahun ini, BPK akan menginisiasi pembentukan organisasi profesi di bidang pemeriksaan keuangan negara yang dinamakan dengan

Institute of State Finance Auditor (ISFA) atau Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN).

Pelaksanaan upacara HUT ke-73 BPK diikuti oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan para Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota BPK. Upacara turut dihadiri para pimpinan BPK periode sebelumnya dan pensiunan pegawai BPK yang tergabung dalam Persatuan Pasca Karya BPK (Pepaska).

Di sela-sela perayaan HUT, ketua BPK era 2004-2009 Anwar Nasution berpesan agar BPK tetap maju dan independen. Ia pun memuji langkah BPK karena tak hanya berupaya menjadi lembaga yang mengawasi dan memeriksa keuangan negara. “Namun juga

mencegah korupsi seperti dalam kasus Jiwasraya,” kata Anwar Nasution.

Sementara itu, ketua BPK periode 2009-2014 Hadi Poernomo menilai, banyak kemajuan yang diraih BPK, baik dari dalam negeri maupun pengakuan secara internasional. “Soal kemajuan, BPK sudah berada di relnya, ini sudah tepat. BPK juga lembaga yang menghormati seniornya, seperti yang dilakukan saat ini,” ucap dia.

Di lokasi yang sama, ketua BPK periode 2017-2019 Moermahadi Soerjaja Djanegara berharap BPK semakin maju. Ia juga berharap BPK semakin diakui kinerjanya di dalam negeri maupun di dunia internasional. “Selamat ulang tahun yang ke-73 semoga semakin maju,” kata Moermahadi. ●



● Pimpinan bersama Dharma Wanita Persatuan Setjen BPK dan para pegawai BPK dalam Syukuran HUT ke-73 BPK RI.

Membangun Kebersamaan Lewat *Family Gathering*



● Pimpinan BPK membuka rangkaian acara *Family Gathering*.

Pelaksanaan *family gathering* turut melibatkan para purnabakti BPK. Ini sebagai upaya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan para insan yang pernah membesarkan BPK di masa lampau.

BPK menggelar acara *family gathering* sebagai bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 BPK. Kegiatan itu dihadiri pegawai BPK beserta keluarga dan para purnabakti atau pensiunan. Acara yang digelar pada Sabtu (18/1) di Jakarta tersebut, turut dimeriahkan sejumlah musisi.

Dalam pidato sambutannya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, tujuan utama kegiatan *family gathering* tahun ini adalah membangun kegembiraan bersama keluarga. Menurut Agung, bagian penting dari pekerjaan adalah kebersamaan.

Mengutip artikel dari *Harvard Business Review* berjudul “*How the Best of the Best Get Better and Better*”, Agung mengatakan, salah satu kunci menjadi lebih baik adalah merayakan kemenangan.

“Merayakan hal-hal seperti ini merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk kita menjadi lebih baik. Semoga kebersamaan ini *last long* dan menjadi modal bagi kita melaksanakan tugas-tugas setahun ke depan,” kata Agung.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengapresiasi pelaksanaan *family gathering* tahun ini yang berjalan sukses. Dia menilai, pelaksanaan kegiatan tersebut terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun.

“Ada perbaikan baik dari sisi lokasi, konten, dan dampak yang bisa dirasakan,” kata Agus.

Agus mengatakan, salah satu hal yang baru dilakukan tahun ini adalah melibatkan para purnabakti BPK. Menurut Agus, hal ini dilakukan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan para insan yang pernah membesarkan BPK di masa lampau.

“Kita berharap adanya satu kesaa-

tuhan hati dan adanya perasaan bahwa kita ini adalah satu keluarga di BPK. Kita bersama berpikir bahwa BPK adalah rumah besar yang menjadi tempat kita berkembang, tempat kita menjadi lebih baik, dan tempat kita mengaktualisasikan apa yang kita mampu dan kita bisa untuk dapat bersama membuat rumah ini menjadi lebih besar lagi,” kata Agus.

Dengan semakin bertambahnya usia BPK, Agus mengatakan, pihaknya akan ikut serta mendorong seluruh insan yang berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Agus menyatakan siap membantu pihak terkait untuk dapat secara bersama-sama serta secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan negara.

“Apa yang belum selesai, apa yang belum bisa dipecahkan mari duduk bersama BPK untuk bisa mencari kemungkinan penyelesaian masalah yang ada,” ujar Agus. ●



Tantangan Implementasi SDGs

Tantangan selanjutnya dalam implementasi SDGs terletak pada kemampuan negara memilih target SDGs yang paling signifikan.

Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkomitmen tinggi menjalankan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia bahkan sudah dua kali menyampaikan laporan Voluntary National Review (VNR).

Laporan VNR yang kedua disampaikan Pemerintah Indonesia dalam High-Level Political Forum (HLPF) di Kantor Pusat PBB, New York, pada pertengahan Juli 2019. Dari sebanyak 193 negara anggota PBB, baru 7 negara yang telah menyampaikan VNR untuk kedua kalinya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa negara turut berkontribusi mengawal SDGs di Tanah Air melalui pemeriksaan, mulai dari perencanaan hingga implementasinya. Bahkan, BPK juga memiliki kontribusi di kancah global dengan membagikan ilmu dan pengalaman seputar pemeriksaan SDGs kepada Supreme Audit Institution (SA) atau lembaga pemeriksa suatu negara melalui seminar.

Terbaru, BPK menggelar Seminar Penguatan Fungsi Pengawasan Eksternal pada Implementasi SDGs (*Strengthening External Oversight on The Implementation of SDGs*) yang diselenggarakan di Kantor Pusat BPK, di Jakarta, Senin (16/12).

Seminar yang diinisiasi BPK dan INTOSAI Development Initiative (IDI)



● Wakil Ketua BPK didampingi Anggota II BPK, dan Wakil Direktur Jenderal IDI membuka seminar.

tersebut bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman SAI tentang pemeriksaan SDGs. Dalam seminar tersebut, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan persiapan dan implementasi SDGs Pemerintah Indonesia dan memberikan saran bagi SAI di seluruh dunia sebelum melakukan pemeriksaan SDGs.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam paparannya mengingatkan tujuan utama lahirnya inisiatif global Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Ia mengatakan, pada 25 September 2015, sebanyak 193 negara dalam majelis umum PBB mengadopsi Agenda Pembangunan 2030 berjudul "Mengubah Dunia Kita, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Agenda tersebut memiliki 17 tujuan yang kemudian dikenal sebagai SDGs. "SDGs adalah panggilan universal untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi, dan meningkatkan kehidupan serta kesejahteraan semua orang dan di semua belahan

bumi," kata Agus.

Agus menyampaikan, Pemerintah Indonesia pertama kali menyampaikan VNR pada 2017. Dalam VNR itu, pemerintah menyampaikan telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai bentuk komitmen tertinggi Indonesia untuk mengimplementasikan SDGs. VNR kedua dilaporkan pada tahun 2019 yang diikuti dengan peluncuran peta jalan SDGs sebagai bentuk komitmen jangka panjang.

"Dengan hanya satu dekade yang tersisa untuk mencapai tujuan, saya ingin mengutip ringkasan dari laporan perkembangan SDGs 2019 dari PBB. Laporan perkembangan SDGs terbaru menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan di beberapa bidang, tantangan utama tetap ada," kata Agus.

Berdasarkan laporan tersebut, ungkap dia, tantangan selanjutnya dalam implementasi SDGs terletak pada kemampuan negara memilih target SDGs yang paling signifikan untuk memulai intervensi. Ini adalah tugas yang sulit

karena target SDGs bersifat holistik dan memiliki keterkaitan antartarget.

BPK pun memiliki tiga temuan utama dalam pemeriksaan persiapan dan implementasi SDGs. Pertama, terkait keselarasan perencanaan dan kebijakan. Adanya siklus pemilihan politik yang berbeda menciptakan risiko koherensi kebijakan di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, berkaitan dengan koordinasi antarinstansi. BPK menemukan kompleksitas masalah bersifat lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan yang menciptakan *gap* dalam perencanaan dan kebijakan anggaran.

“BPK juga menemukan bahwa entitas pemerintah masih bekerja secara silo ketika melaksanakan anggarannya karena kurang optimalnya mekanisme koordinasi di tingkat operasional,” ungkap dia.

Terakhir, pada pemantauan dan evaluasi, kemampuan indikator yang ada untuk mewakili penduduk dengan 40 persen pendapatan terendah dari populasi perlu ditingkatkan. BPK menemukan bahwa kurangnya data yang digunakan dalam menyusun indikator untuk pemantauan dan evaluasi layanan publik terjadi karena perencanaan survei dilakukan secara silo berdasarkan anggaran lembaga yang memiliki mandat untuk melakukan survei dengan pendekatan sektoral.

Sebagai perbaikan ke depan, BPK pun mengeluarkan sejumlah rekomendasi. BPK memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk memperkuat Perpres mengenai implementasi SDGs. BPK merekomendasikan pemerintah menerbitkan perpres yang mampu mempromosikan perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah yang berkualitas untuk memberikan akses ke layanan publik bagi 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah yang tepat sasaran. Kemudian membangun integrasi data pada seluruh lapisan kementerian dan lembaga. Tujuannya agar ada indikator yang akurat dalam mengukur pencapaian target SDGs.

Berdasarkan tema VNR 2019, BPK

melakukan pemeriksaan implementasi SDGs dengan fokus tentang pendidikan berkualitas. Dalam pemeriksaan ini, BPK menemukan bahwa pada tahap implementasi, data yang tidak akurat dari 25 persen populasi berpenghasilan terendah sebagai target dari program dukungan pendanaan pendidikan, telah menimbulkan adanya potensi distribusi pendanaan yang tidak tepat sasaran.

Selain itu, dalam beberapa kasus, BPK menemukan bahwa kurangnya koordinasi antarentitas pemerintah, telah memicu tumpang tindih sumber daya ketika menjalankan proyek infrastruktur untuk membangun fasilitas dan melengkapi peralatan sekolah.

Berkaca pada pengalaman pemeriksaan yang telah dilakukan, Agus pun menyarankan kepada SAI untuk

memperhatikan tiga hal sebelum melakukan audit SDGs. Pertama, berkaitan dengan kapasitas kelembagaan. SAI perlu memastikan mandat yang dimilikinya terlebih dahulu.

Kedua, kapasitas organisasi. Mengingat periode implementasi SDGs akan berakhir pada 2030, maka diperlukan strategi pemeriksaan yang komprehensif dan jangka panjang. Dalam hal ini, BPK RI dalam rencana strategisnya telah menyelaraskan prioritas pemeriksaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Sedangkan ketiga adalah terkait dengan kapasitas pemeriksa. Kompleksitas pendekatan pemeriksaan SDGs membutuhkan auditor dengan kemampuan analisis yang lebih komprehensif,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota II BPK Pius Lustrilang dalam sambutannya mengatakan, IDI dapat membuka perspektif yang lebih luas tentang bagaimana SAI dapat mengaudit SDGs dan mungkin menyediakan sarana yang lebih baik untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Selain dapat meningkatkan kapasitas SAI, pertemuan ini juga diharapkan mempromosikan teknik-teknik pemeriksaan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan tentang pentingnya upaya peningkatan fungsi *external oversight* pada implementasi SDGs.

“Saya yakin auditor kami akan memanfaatkan secara efektif kesempatan ini untuk mengeksplorasi model audit yang baru ini dan kemudian menerapkan teknik ini pada tugas yang akan datang,” kata dia.

Seminar Penguatan Fungsi Eksternal dalam Implementasi SDGs ini turut dihadiri Wakil Direktur Jenderal IDI Archana Shirsat, para ahli IDI, Organisasi Lembaga Pemeriksa Keuangan se-Asia (Asian Organization of Supreme Audit Institutions/ASOSAI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Universitas Indonesia, Bank Dunia, dan GIZ. Seminar juga diikuti pelaksana di lingkungan BPK Pusat dan Perwakilan. ●



AGUS JOKO PRAMONO WAKIL KETUA BPK

Terus Lakukan Perubahan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah berusia 73 tahun. Ada banyak perubahan yang telah dilakukan. Pencapaian BPK di dunia internasional pun semakin banyak. Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menyatakan, perubahan demi perubahan akan terus dilakukan oleh BPK. Kepada *Warta Pemeriksa*, pria kelahiran Palembang tersebut memaparkan sejumlah perubahan yang telah dan akan dilakukan BPK. Berikut petikan wawancaranya:

Selama tujuh tahun mengabdikan sebagai Anggota dan sekarang menjabat Wakil Ketua, bagaimana bapak melihat perkembangan BPK?

Saya melihat kita semakin bertumbuh dan semakin berubah. Alhamdulillah, saya merasa kita berubah ke arah yang lebih baik. Banyak hal-hal yang dulu terbentuk secara tidak ter-sistematisasi, sekarang sudah mulai disistematisasikan. Misalnya, masalah sumber daya manusia (SDM), pelaporan, pelaksanaan pemeriksaan, sampai ke masalah pengawasan. Kita sudah mulai sangat memperhatikan tingkat kehati-hatian dan tingkat kesesuaian dari suatu pelaksanaan aktivitas di BPK.

Kita juga sudah mengubah *positioning* BPK. Tadinya kita hanya *inward looking*, yaitu melihat proses bisnis internal saja. Sekarang kita sudah masuk kepada ranah *outcome base*, di mana dampak dari hasil suatu pemeriksaan kita perhatikan dan kita fokuskan. Bukan hanya pengelolaan administrasi yang kita perhatikan, tapi apakah pemeriksaan ini menghasilkan *outcome* yang cukup baik bagi *auditee*. Dan saya rasa hal-hal ini akan terus berkem-

bang seiring perubahan visi kita.

Kita mendorong pengelolaan keuangan negara agar berkualitas dan bermanfaat. Kita arahkan agar pemeriksaan menghasilkan hal yang betul-betul diinginkan masyarakat dari suatu proses bernegara. BPK merupakan bagian penting dari pelaksanaan proses bernegara ini karena BPK bisa memetakan apa saja *best practices* yang terjadi dan mana saja *fraud* serta langkah-langkah yang dilakukan *auditee* dalam menyelesaikan masalah. Kita tidak hanya mengandalkan laporan, tapi kita langsung kepada *source of original entry*. Artinya, kita langsung ke bukti transaksi pada saat kejadian itu muncul.

BPK belakangan ini tampak lebih membuka diri kepada media dan publik. Hal apa yang ingin dicapai atau ditargetkan BPK atas keterbukaan tersebut?

Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, BPK memang sudah membuka diri. Target saya ke depan agar BPK lebih berperan sebagai *alert system* di republik ini. Kalau ada temuan langsung disampaikan agar pu-

blik *aware*. Dalam beberapa kasus, kita *alert* tapi agak di belakang, sehingga tidak terbentuk *awareness* sebelum kejadian itu meledak. Ke depan kita buat *alert*-nya agak ke tengah, tidak terlalu di depan, tidak terlalu di belakang. Sehingga *auditee* juga memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan perbaikan perbaikan yang bersifat masif.

Dulu kita mengambil sikap untuk tidak membahas di ruang publik. Namun ternyata *awareness auditee* itu muncul apabila masalah itu dibahas di ruang publik. Padahal hal yang sama sudah kita bahas secara tatap muka. Tapi tidak menjadi perhatian signifikan sebelum itu masuk ke ruang publik. Kalau memang proses bisnis yang ada di pemerintahan seperti itu, ya kita ikuti. Kita bawa ke ruang publik masalah-masalahnya.

Apakah perubahan yang terjadi di BPK saat ini sudah dimulai ketika bapak pertama kali mengabdikan di BPK?

Saya masuk ke BPK pada 2013. Menjadi Anggota. Pada saat itu saya sudah mengatakan bahwa BPK melakukan pemeriksaan keuangan



Wakil Ketua BPK RI, Agus Joko Pramono

”

Kita mendorong pengelolaan keuangan negara agar berkualitas dan bermanfaat. Kita arahkan agar pemeriksaan menghasilkan hal yang betul-betul diinginkan masyarakat dari suatu proses bernegara.

negara untuk meluruskan arah pembangunan demi mencapai tujuan negara. Jadi sangat selaras dengan apa yang kita lakukan sekarang.

Presentasi saya waktu mengikuti *fit and proper test* di DPR adalah bagaimana meluruskan arah kebijakan pelaksanaan anggaran. Karena sebuah perencanaan akan diberikan anggaran. Lalu, anggaran akan dibuat pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban ini akan diperiksa BPK. Itulah proses bisnis di seluruh *auditee*.

Jadi, kalau kita melakukan pemeriksaan mulai dari tahapan perencanaan, maka kita sudah meluruskan arah pembangunan di Indonesia. Apa yang saya sampaikan saat masuk BPK tujuh tahun lalu, itu memang apa yang sekarang sedang kita lakukan bersama, yaitu untuk meletakkan BPK menjadi organisasi yang memang sesuai dengan kapasitasnya. BPK bisa masuk ke seluruh instansi, ke seluruh pengelola keuangan negara, sehingga BPK wajib memberikan rekomendasi yang strategis.

Kita bekerja bukan hanya berdasarkan pada perencanaan. Pelaksanaan di lapangan juga berdasarkan dokumen

tertulis. Dokumen tertulis menyatakan demikian. Renstra (Rencana Strategis) kita menyatakan demikian, Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) kita juga menyatakan demikian. Jadi menurut saya, berdasarkan yang tertulis ini, maka semangat ini ada di semua Anggota BPK.

Menurut bapak, apa yang menjadi tantangan BPK saat ini?

Dari segi SDM, SDM ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dia merupakan daya dorong bagi BPK. Tapi di sisi lain, jika ada perilaku *misconduct*, yaitu seseorang yang tidak melaksanakan profesinya dengan benar, tentu ini jadi permasalahan bagi BPK. Kita berusaha menekan proporsi ini. Jadi, tantangan ke depan adalah mengelola perilaku orang. Apalagi, kalau Anda punya data, punya kemampuan menganalisis data, punya kemampuan mengakses aktivitas seseorang terkait penggunaan fasilitas-fasilitas negara, kalau Anda tidak mempunyai *passion*, kecintaan terhadap pekerjaan, dan jiwa idealisme yang cukup, maka Anda bisa saja menyalahgunakannya.

Tantangan berikutnya mengelola sistem informasi (IT). Data yang dimiliki BPK itu sangat banyak dan besar sekali, mulai dari BUMN, kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kemudian organisasi kenegaraan yang berperan penting bagi negara, hingga perusahaan asing yang melakukan kerja sama kontrak karya. Kita harus mengelola data yang kita miliki ini untuk meluruskan kebijakan yang dibuat.

Seperti apa langkah BPK dalam menjaga perilaku SDM, khususnya auditor?

Langkahnya bahkan sangat spesifik. Kita terus memperkuat Kode Etik BPK. Kode Etik ini penting untuk kita memperbaiki *rule of the game*. Kalau kita lihat, peraturan mengenai Kode Etik sangat dinamis. Hampir setiap tahun bertambah. Kode Etik juga kita sosialisasikan kepada *auditee* bagaimana mereka seharusnya bersikap kepada auditor BPK.

Langkah lainnya adalah melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). Di MKKE ini ada tiga orang yang berasal dari eksternal, sedangkan dua anggota lainnya dari internal. Dengan komposisi ini, maka MKKE memiliki tingkat independensi yang cukup. Putsannya pun final dan mengikat.

Hal apa lagi yang akan dilakukan untuk meningkatkan SDM BPK?

Kita sekarang membuat sistem bagaimana menilai SDM dari sisi tingkat kapasitas teknis dan sikap. Alhamdulillah, BPK per Januari 2020 ini termasuk yang diakui oleh Menpan RB sebagai lembaga yang sudah menggunakan *merit system*. Artinya, kapasitas dan kapabilitas berdasarkan model penilaian tertentu sudah dilakukan. Kita sudah tidak perlu melakukan lelang terbuka untuk mengisi suatu jabatan. Karena kapasitas orang yang akan ditunjuk mengisi suatu jabatan sudah terekam secara baik. Intinya, kita sudah



tahu mana orang-orang yang sudah mampu dan sudah tiba saatnya untuk mengisi sebuah jabatan.

Kinerja BPK semakin diakui di dunia internasional. Terakhir, BPK terpilih sebagai auditor eksternal International Maritime Organization (IMO). Apakah rencana pengembangan kapasitas SDM memang didesain agar BPK bisa berkiprah di dunia internasional?

Jadi begini. BPK kan satu-satunya auditor eksternal bagi pemerintah. Nah, kalau kita mau melakukan *benchmarking*, kita *benchmark* ke mana? Otomatis kita melihat praktik terbaik di dunia internasional. Kita mau mengetahui kita ini selevel apa di internasional. Rencana kita memang ingin menggiring BPK untuk duduk di level internasional, sehingga tahu *positioning* kita.

Kita ikut banyak organisasi internasional, mulai dari ASEANSAL hingga INTOSAI. Itu untuk menimbulkan kepercayaan diri dan mengetahui bahwa *positioning* kita sudah *on the track* dan berada di atas rata-rata. Kita membandingkan dengan standar-standar internasional yang ada. Caranya bagaimana? Secara aktif mengaudit organisasi internasional. Kita harus melihat seperti apa praktik terbaik organisasi-organisasi internasional, lalu dilihat juga ke Indonesia seperti apa.

Contohnya, kalau kita mengaudit Kementerian Perhubungan (Kemen-

hub). Agar kita tahu apakah Kemenhub sudah melaksanakan sesuatu yang bagus, misalnya, akan susah kalau kita tidak punya *benchmark*. Kita mungkin selama ini melihat segi kepautuhan saja. Dia taat atau tidak terhadap peraturan perundang-undangan. Tapi, *benchmarking* proses bisnisnya kita tak punya. Nah, dengan mengaudit IMO, kita tahu secara *benchmark*, Kemenhub untuk mengurus sektor transportasi laut seperti apa. Ini penting sebagai komparasi.

Jadi, keterlibatan di dunia internasional bukan hanya untuk melihat *positioning* BPK. Memang, pada waktu kita menang atau terpilih sebagai auditor eksternal IMO, kita tahu bahwa BPK cukup dihargai. Tapi lebih dari itu, kita bisa masuk untuk mengetahui seperti proses bisnis di IMO dan di kementerian kita.

Ternyata, banyak juga beberapa hal yang menunjukkan bahwa Indonesia lebih bagus daripada dunia internasional. Itu yang kita rekomendasikan ke sana. Karena begini, ada risiko-risiko yang akan muncul, sudah pernah terjadi di Indonesia dan sudah pernah kita buat model solusinya.

Kita sudah hapal betul model perjalanan dinas, termasuk plus dan minusnya. Nah, di internasional belum muncul peristiwa-peristiwa seperti itu.

Apa target dan mimpi BPK di dunia internasional?



Kita ikut banyak organisasi internasional, mulai dari ASEANSAI hingga INTOSAI. Itu untuk menimbulkan kepercayaan diri dan mengetahui bahwa *positioning* kita sudah *on the track* dan berada di atas rata-rata.

Organisasi internasional itu penghulunya atau induknya adalah United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita targetnya aktif di UN. Salah satu *positioning* yang cukup prestisius bagi BPK di dunia itu adalah UN Auditor Panel.

Kedua, kita ingin semakin diakui di level INTOSAI yang menjadi wadah bagi organisasi lembaga pemeriksa negara sedunia. Kita berusaha memberikan keyakinan kepada dunia bahwa kita mampu menjadi *chair*, menjadi ketua INTOSAI. Sejauh ini kita targetkan menjadi ketua INTOSAI pada 2028. Memang masih jauh, tapi langkah menuju ke sana harus kita lakukan dari sekarang. Karena untuk menjadi sesuatu di internasional, itu tidak bisa dilakukan secara instan.

Seberapa siap BPK dalam mencapai target-target di lingkup internasional?

Kita sangat siap secara organisasi, SDM, dan pendanaan. Tinggal kesempatannya apakah muncul atau tidak. Kita juga terus meningkatkan kerja

sama dengan kementerian/lembaga lainnya, seperti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Dengan Kemenlu, kita sama-sama melakukan kajian apakah BPK betul-betul punya kans untuk ikut andil. Sekali ada peluang, kita langsung bertindak. Sekarang kita juga sedang mengincar menjadi auditor eksternal International Telecommunication Union (ITU) pada 2020. *Action*-nya harus dari sekarang.

Kita menjadi auditor eksternal IMO sampai 2023, IAEA (International Atomic Energy Agency) sampai 2021. Harus ada terus. IAEA kita sudah enam tahun. Jadi kita nanti harus *handover* sambil mencari yang lain. Intinya, kita terus coba masuk ke dunia internasional.

Pesan apa yang ingin bapak sampaikan kepada para auditor?

Pedomani standar yang ada, yaitu ISSAI. Selain itu harus selalu berpikir terbuka. Ini penting. Anda kalau sudah menjadi auditor di bidang konstruksi, maka pikiran Anda akan mengenai konstruksi saja karena kebiasannya mengaudit konstruksi. Seolah-olah dunia ini hanya bidang konstruksi.

Sehingga, penting sekali bagi auditor untuk *keep open mind*, *keep learning*, bahwa fokus itu tidak hanya satu. Kita berusaha membentuk auditor yang sifatnya memahami bagaimana model berbangsa dan bernegara, sehingga rekomendasi yang dibuat memang bukan hanya sekadar berbasis administrasi, tapi juga pada *outcome base*.

Sejumlah pimpinan BPK sempat menyinggung ihwal kemandirian anggaran. Seperti apa kemandirian anggaran yang ingin dicapai?

Kita setiap lima tahun diuji dan diperiksa oleh SAI (lembaga pemeriksa negara) dari luar negeri untuk melihat *performance measurement* apakah diterapkan di BPK. Yang menjadi domain nomor satu adalah independensi dan *legal framework*, apakah independensi dan *legal framework* BPK mencukupi

untuk melaksanakan kewenangannya.

Salah satu yang mereka definisikan dalam independensi adalah independensi di bidang pengelolaan anggaran dan SDM. Independensi terhadap siapa? Terhadap yang diperiksa dalam hal ini pemerintah.

Yang kita periksa *kan* pemerintah. Nah, pada waktu mereka bertanya, bagaimana pola penyusunan anggaran kita, ternyata anggaran kita masih bisa diubah oleh pemerintah. Menurut tim *peer reviewer*, inti tidak independen terkait pengelolaan anggaran. Seharusnya anggaran kita hanya dikontrol oleh parlemen, bukan oleh pemerintah. Kalau sekarang *kan* tidak.

BPK terus berusaha meningkatkan independensinya. Bukan masalah kontrol, tapi masalah siapa yang bisa mengalokasikan besaran anggaran untuk BPK dalam melakukan aktivitasnya.

Kalau Anda saya periksa, Anda yang menentukan uangnya, bisa saja Anda tidak memberikan uang yang cukup untuk saya agar saya tidak periksa kalau Anda tidak berkeinginan untuk diperiksa. Kira-kira begitu normanya.

Sampai saat ini kita terus bahas dengan pemerintah seperti apa modelnya. Sebenarnya, UUD 1945 sudah menyatakan bahwa dalam pemeriksaan laporan keuangan negara, maka dibentuk suatu BPK yang mandiri. Mandiri ini apa terminologinya? Kalau secara internasional, ya mencakup anggaran.

Apa kegiatan yang biasa bapak lakukan untuk melepas penat atau mengisi waktu senggang?

Saya lebih suka duduk melakukan renungan di pagi hari setelah shalat subuh atau pada malam hari. Melakukan kontemplasi, memikirkan seperti apa yang harus dilakukan ke depannya.

Kalau hobi, terkadang saya main musik. Tapi tidak terlalu pintar juga. Untuk olahraga, saya menjadi pembina Persatuan Panahan Indonesia (Perpani). ●

Harapan Kepada BPK

Badan Pemeriksa Keuangan genap berusia 73 tahun pada 1 Januari 2020. Kepada *Warta Pemeriksa*, sejumlah tokoh memberikan ucapan selamat dan membagikan pengalaman kerjanya bersama BPK. Mereka juga menyampaikan harapan-harapannya kepada BPK.



wikimedia.org

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan **Siti Nurbaya Bakar**

Selamat ulang tahun BPK yang ke-73. Kami di KLHK merasakan bimbingan yang sangat baik. Saya mempersepsikan itu bersama seluruh jajaran kementerian bahwa BPK telah memberikan pedoman dan bimbingan kepada jajaran kementerian untuk taat aturan, tidak ada transaksi tersembunyi, dan yang paling penting adalah tertib administrasi dan anggaran.

Menurut saya, hal itu sangat penting tidak hanya untuk KLHK tapi juga semua birokrasi dan jajaran K/L lainnya. Karena kegagalan dalam tiga hal itu, artinya kegagalan dalam menjalankan tugas. Jadi, selamat ulang tahun BPK RI. Senantiasa keren dan semakin hebat. ●



Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi **Tjahjo Kumolo**

Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada BPK yang ke-73. Semoga BPK semakin kredibel dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan demi kemaslahatan masyarakat Indonesia menuju Indonesia unggul. Bersatu padu, BPK maju. ●





Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

BPK adalah salah satu institusi dan instrumen negara yang paling strategis dan dibutuhkan oleh semua unit kerja kenegaraan. Saya terbiasa menghadirkan BPK dalam semua peranan dan fungsi dari unit kerja yang saya miliki. Oleh karena itu, kami berharap ke depannya sebelum ditemukan kesalahan, BPK sudah mendampingi dan memberikan *advice* dan itu yang perlu ditindaklanjuti.

Berdasarkan pengalaman saya, sepanjang pendekatan BPK secara profesional terjadi maka pemerintahan bisa lebih efektif untuk bergerak maksimal dan mencapai target yang ingin dicapai. Saya berharap BPK akan lebih dekat dengan pemerintah dan semakin profesional. Selain itu, tentu saja BPK harus menjadi energi bagi pemerintahan untuk mencapai target-targetnya. ●



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

Saya Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR mengucapkan selamat hari bakti kepada BPK yang ke-73. Bagi Kementerian PUPR, saya kira BPK sudah menjadi angin segar karena telah banyak membantu selama ini. BPK banyak membantu kami dalam mengelola keuangan negara menjadi lebih baik.

Sesuai dengan harapan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Ibu Isma Yaton, komunikasi harus berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami juga harus memberikan akses data dengan baik. Hal itu sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, tidak boleh ada hal-hal yang disembunyikan.

Kebersamaan dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara di fungsinya masing-masing saya kira akan menjadikan manajemen tata kelola keuangan negara ke depan akan lebih baik.

Saya berharap unsur pembinaan kepada K/L bisa mendapatkan porsi yang lebih banyak. Ini untuk perbaikan ke depan seperti yang disampaikan Menko Maritim juga. Kalau hanya mencari kesalahan pasti lebih mudah daripada melakukan pembinaan. Saya kira pembinaan tidak lebih mudah, tapi pasti hasilnya akan lebih baik. ●



”

Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Bambang Soesatyo

Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada BPK yang ke-73. Semoga BPK ke depannya semakin kredibel dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bersatu padu, BPK maju. ●



dpr.go.id

”



Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi

Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada BPK yang ke-73. Semoga BPK menjadi semakin kredibel dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan demi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kementerian Perhubungan konsisten mendukung BPK dengan menjaga kualitas mutu serta kinerja dalam memberikan pelayanan transportasi nasional yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Kami berkomitmen mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Bersatu padu, BPK maju. ●

”

Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian

Saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI mengucapkan selamat ulang tahun kepada BPK yang ke-73. Semoga BPK terus menjadi lembaga negara yang profesional dan berintegritas dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Bersatu padu, BPK maju. ●



kemendagri.go.id

MEMBANGUN INTEGRITAS DAN KEJUJURAN Lewat Cafe Basamo



■ Diskusi di Cafe Basamo.



■ Peresmian Cafe Basamo oleh Anggota IV BPK Isma Yatun.



■ Anggota IV BPK Isma Yatun saat peresmian Cafe Basamo.

Para pegawai senang dengan keberadaan Cafe Basamo. Konsep kantin kejujuran yang diusung pun masih dapat dipertahankan.

Membangun sikap kejujuran bisa dilakukan dari hal yang sederhana. Hal itu seperti yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan mendirikan kantin kejujuran.

Ide utama pendirian kantin kejujuran bermula dari obrolan-obrolan

ringan pejabat struktural BPK Provinsi Bengkulu untuk pengembangan fasilitas kantor. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu R Aryo Seto Bomantari menceritakan, dari hasil obrolan itu diketahui terdapat lahan luas di *roof top* lantai 2 gedung yang kosong dan dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas kantor.

"Kenapa kantin kejujuran yang dipilih karena beberapa alasan. Pertama, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu belum memiliki kantin. Kedua, dengan model kantin kejujuran, kami ingin melatih kejujuran dan tanggung jawab para pegawai. Sehingga secara tidak langsung dapat melatih integritas pegawai," kata Aryo.

Karena menerapkan konsep kantin kejujuran, maka pembeli secara mandiri mengambil sekaligus membayar barang yang dibelinya dengan meletakkan uang sesuai dengan daftar harga barang yang tertera di kotak pembayaran yang telah disediakan. Nantinya, uang yang terkumpul akan dijadikan sebagai modal untuk mengisi kembali barang-barang yang dijual di kantin.

Aryo menambahkan, tujuan lain pendirian kantin kejujuran adalah untuk memberdayakan tenaga tidak tetap dan *office boy* di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Para pegawai tidak tetap, *office boy/girl*, juga pegawai tetap dipersilakan menjajakan barang dagangannya di Cafe Basamo.

"Kami berharap kantin ini setidaknya dapat menambah penghasilan bagi mereka atau setidaknya mengenalkan produk hasil kreasi mereka. Kedepannya direncanakan dibentuk koperasi karyawan yang salah satunya mengelola kantin tersebut," kata dia menambahkan.

Cafe Basamo juga didirikan dengan semangat mengembangkan program *Go Green*, yaitu untuk mengurangi polusi asap rokok di lingkungan kantor perwakilan.

"Sebelum adanya kantin, para perokok seringkali merokok di sembarang tempat salah satunya di dalam gedung kantor yang ber-AC. Pembuatan kantin ini merupakan salah satu solusi untuk melokalisasi perokok se-



■ Cafe Basamo.



■ Kunjungan Anggota V BPK Bahrullah Akbar ke Cafe Basamo.

hingga gedung kantor dapat terbebas dari asap rokok," ucap dia.

Cafe Basamo pun bukan kantin biasa karena juga menjadi *co-working space* bagi pegawai BPK. Alasannya tentu saja karena saat ini adalah zamannya milenial di mana mereka dalam bekerja lebih suka bekerja dengan suasana kafe yang santai dan tidak kaku.

"Tersedia banyak colokan listrik dan wifi serta desain kafe yang santai tidak kalah dengan kafe-kafe di luar kantor. Di kantin tersebut teman-teman pemeriksa dapat bekerja, berdiskusi, rapat, atau bahkan nonton bareng selepas jam kerja karena kami siapkan juga proyektor sebagai pendukungnya," ucap dia.

Menurut dia, pegawai dan pihak tamu BPK Perwakilan Bengkulu

merespons positif keberadaan Cafe Basamo ini. Mereka mendukung dan ikut terlibat dalam menyukseskan program kantin kejujuran ini. Buktinya, barang-barang yang dijual selalu laris dibeli pengunjung kantin.

Sampai saat ini tidak ada kendala berarti dalam operasional kantin kejujuran. Hasil evaluasi pun menunjukkan tren positif. Para pegawai senang dengan keberadaan kantin dan konsep kejujuran yang diusung masih dapat dipertahankan. "Hal tersebut membuktikan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dapat diandalkan."

Namun, ia mengakui ada beberapa evaluasi yang harus segera ditindaklanjuti, antara lain keluhan panasnya suhu ruangan di pagi sampai siang hari. Keluhan ini sebenarnya sudah diantisipasi dengan pembuatan atap dan penambahan tenda gulung. "Terdapat juga masukan dari pegawai untuk menambahkan menu barang dagangan.

"Ketepatan waktu pengisian kembali barang dagangan juga harus kami perhatikan karena beberapa kali kami telat untuk mengisinya. Ke depan kami ingin memaksimalkan potensi dari pegawai tidak tetap dan OB melalui koperasi yang akan kami bentuk," ungkap dia.

Cafe Basamo selesai dibuat pada akhir Agustus 2019 dan diresmikan oleh Anggota IV BPK Isma Yatun saat masih menjabat sebagai Anggota V. Peresmian dilakukan pada 6 September 2019 selepas kegiatan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu. Isma Yatun pula yang memberikan nama Cafe Basamo sebagai nama resmi kantin kejujuran di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Menurut Aryo, keberadaan kantin kejujuran di BPK Bengkulu diapresiasi positif oleh Anggota IV BPK Isma Yatun dan Anggota V BPK Bahrullah Akbar. "Beliau berharap agar hal positif seperti kantin kejujuran seperti di BPK Bengkulu dapat diadopsi dan dikembangkan di semua satker Perwakilan BPK, khususnya di AKN V," ucap Aryo. ●



■ Kunjungan Anggota V BPK Bahrullah Akbar ke Cafe Basamo, 14 November 2019.

Kecerdasan Emosi untuk Pribadi yang Berintegritas, Independen dan Profesional

OLEH TIM SUBBAGIAN KONSULTASI

Ditulis berdasarkan Power Point dari Narasumber Seminar; Analisa Widyaningrum, M.Psi., Psikolog

Pada tahun 2015, para HR tidak memasukkan kecerdasan emosi dalam kualifikasi yang dibutuhkan oleh pegawai. Namun saat ini, kecerdasan emosi mulai dimasukkan dalam kualifikasi yang dicari. Palsanya saat ini kita sudah memasuki masa industri 4.0, masa di mana teknologi berperan pesat dan beberapa pekerjaan sudah bisa digantikan oleh mesin ataupun kecerdasan buatan (AI). Dengan mesin atau AI lebih menguntungkan karena mesin tidak memiliki karakter negatif yang sering kali dimiliki manusia seperti misalnya "mudah baper". Lalu apa yang membuat manajemen masih memilih memperkerjakan manusia daripada mesin? *Human touch!* Komponen-komponen seperti kreativitas, fleksibilitas berpikir, *problem solving* yang kompleks, termasuk kecerdasan emosi akan menjadi komponen berharga dalam diri manusia yang tidak tergantikan oleh mesin atau kecerdasan buatan (AI). Oleh karena itu, agar dapat bersaing tidak hanya dengan tenaga kerja lainnya maupun mesin, kita harus meningkatkan kompetensi, "*hard skill*" maupun "*soft skill*", termasuk di dalamnya adalah kecerdasan emosi.



Bagaimana sebetulnya dunia kerja saat ini, siapa saja yang ada di dalamnya dan bagaimana dinamikanya? Di dunia kerja saat ini, terdapat lima generasi yang bekerjasama dan berinteraksi serta berkomunikasi satu sama lain; Generasi *baby boomers* (1940-1959), Gen X (1960 – 1979), Gen Y/milenial (1980-1994), Gen Z (1995-2010), serta Gen Alpha (>2000). Para manajer saat ini kebanyakan termasuk generasi milenial (Gen Y), bos termasuk generasi X, lalu staf termasuk dalam generasi Z. Apakah ini jadi masalah? Bisa iya, bisa juga tidak. Perbedaan antar generasi bisa menimbulkan "jarak" antargenerasi yang bisa timbul karena perbedaan nilai memandang kehidupan dan pekerjaan, gaya komunikasi, cara kerja, kedekatan dengan teknologi, dan pola pikir. Contohnya ada sekelompok milenial yang berpapasan dengan pegawai yang lebih senior, namun hanya satu yang tersenyum. Bagi

pegawai senior, sekelompok milenial tersebut sangat tidak sopan dan kurang hormat pada orang lain. Namun dari sudut pandang pegawai milenial mereka bukan bermaksud untuk tidak hormat/tidak sopan karena senyuman mereka sudah diwakilkan oleh satu orang tadi. Hanya senyum saja perlu diwakilkan? Bagi generasi X ini sangat aneh, namun bagi generasi milenial (Y) hal itu wajar-wajar saja karena karakter generasi Y menyukai kepraktisan. Namun positifnya mereka optimis, dan bisa diajak bergerak cepat.

Perbedaan antar generasi nyata, dan bisa menimbulkan masalah komunikasi di tempat kerja. Supaya mengurangi masalah karena perbedaan generasi tersebut, para pegawai yang berbeda generasi perlu saling toleransi dan saling memahami perbedaan sudut pandang masing-masing. Dengan demikian tempat kerja akan memiliki atmosfer kerja yang kondusif, dan tiap

generasi justru bisa belajar hal-hal baru yang bisa saling menguatkan dan mengembangkan kemampuan mereka. Dengan begitu tempat kerja terwujud sebagai sebuah tempat pembelajaran yang berkembang (universitas), bukan menjadi seperti kerjaan di mana raja adalah segala-galanya, tidak ada yang boleh lebih tinggi darinya. Sementara itu bila di universitas, seorang rektor justru akan bangga jika ada dosen/mahasiswa yang menang kompetisi internasional dan menjadi pribadi yang lebih maju dan berkembang dari dirinya. Jadi sebaiknya seorang pimpinan justru bangga jika bawahannya bisa lebih berkembang dari pada pimpinan itu sendiri.

Dalam suatu tempat kerja baik yang berbentuk perusahaan atau organisasi, di dalamnya akan terdapat sumber daya manusia yang berperan sebagai pemimpin (*leader*), dan staf/pengikut (*follower*). Kepemimpinan dalam suatu organisasi memberikan pengaruh yang besar pada keberhasilan organisasi, termasuk juga kualitas kerjasama timnya. Sebagai seorang pemimpin/*leader*, peran yang perlu dilakukan adalah memandu, memberikan arah, memotivasi dan menginspirasi lingkungannya (orang-orang/staf di lingkungannya).

Mindset seorang pemimpin menjadi kunci bagaimana ia dapat melakukan perannya dengan baik. Pola pikir seorang pemimpin yang memandang anggota tim sebagai "anak buah" perlu diubah! Karena jika dipandang sebagai anak buah, artinya mereka tidak diberi kepercayaan dan terus menerus dimonitor. Padahal sebagai sebuah tim, seorang *leader* juga tergantung pada anggota timnya. Ketika terjadi interaksi (yang baik) dari komunikasi terkait pekerjaan antara pemimpin dan pengikut, maka akan muncul kepuasan (*self-fulfilling*) yang tinggi. Dan ini tidak hanya berlaku pada satu pihak, tapi dialami baik pemimpin maupun anggota tim. Pemimpin yang berperan dengan baik akan membawa timnya pada fase unjuk kerja optimal

BABY BOOMERS	GEN X	GEN Y	GEN Z	GEN ALPHA
• Lahir di antara tahun 1940 - 1959	• Lahir di antara tahun 1960 - 1979	• Lahir di antara tahun 1980 - 1994	• Lahir di antara tahun 1995 - 2010	• Lahir di antara tahun > 2010
• Live to work	• Work to live	• Work-life balance	• Work for travelling	• Generasi yg terlahir dan tumbuh dengan teknologi
• Pekerja keras	• Process oriented	• Result Oriented	• Result oriented dan lebih instan	• Paling terdidik
• Komunikasi Hierarkis	• Menyukai struktur jelas	• Tidak suka komunikasi kaku	• Sangat lekat dg teknologi	• Perilaku lebih individualis dan kritis
• Resistan terhadap hal baru dan teknologi	• Mulai mengenal teknologi	• Dekat dengan teknologi	• Banyak entrepreneur	• Profesi youder, gamer, dsb
• Konservatif	• Cenderung skeptis	• Work flexibility	• Open minded dan lebih toleran	

(*performing*), namun bila belum sampai di sana, maka timnya akan berada pada fase-fase sebelumnya yaitu fase pembentukan (*forming*), membadi/ribut (*storming*), dan fase *norming* (pembentukan norma/nilai).

Kepemimpinan yang baik terjadi jika di dalamnya terjadi proses saling mempengaruhi dan dipengaruhi yang positif. Seorang pimpinan yang baik dan diikuti oleh pengikut yang baik maka pimpinan akan tumbuh jadi pemimpin yang lebih baik. Di sisi lain bila seorang pemimpin yang baik namun diiringi oleh *follower* yang buruk, maka ia dapat berubah menjadi pemimpin yang buruk. Interaksi dalam tim sangatlah penting, di mana komunikasi menjadi kuncinya.

Dalam komunikasi terdapat proses timbal balik, yaitu saat pemimpin memberikan respons atas kinerja bawahannya dengan cara yang positif sehingga staf memiliki rasa percaya diri dalam melakukan kerjanya, dan meningkatkan pula motivasi kerjanya untuk tugas berikutnya. Komunikasi menjadi komponen utama dalam terbentuknya interaksi dan persepsi. Kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin mempersepsi staf/pengikutnya. Dan di sisi lain *follower-ship* adalah tentang bagaimana seorang staf/pengikut menaruh harapan kepada pimpinannya.

Suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemimpin (*leader*), tetapi juga oleh staf/pengikut (*follower*). *Follower-ship* itu penting! *Follower-ship* adalah kemampuan individu secara kompeten dan proaktif menjalankan instruksi serta mendukung atasan dalam mencapai tujuan organisasi. Atau juga merupakan keberanian dalam mengambil peran secara bertanggung jawab. Seorang pengikut yang baik/*good follower* adalah mereka yang bisa mendukung dan membantu atasan untuk mencapai tujuan organisasi secara bertanggung jawab. Pada dasarnya, dalam proses seleksi, pegawai yang terpilih adalah individu yang "*skillful*" dan memiliki potensi untuk melakukan kontribusi yang tinggi (STAR). Namun dengan berjalannya waktu dan terjadinya proses "kerjaan", di mana proses kepemimpinan yang baik dan mendukung pembelajaran tidak terjadi, para STAR dapat terdegradasi menjadi Yes Man (berkontribusi namun *unskillful*), Alien (tidak berkontribusi) atau yang lebih parah menjadi TOXIC (*unskillful* dan juga tidak berkontribusi) sehingga menghambat lingkungan kerja mencapai tujuan organisasi.

Kecerdasan Emosi

Kecerdasan emosi menjadi komponen penting bagi tenaga kerja di masa industrial 4.0. Kecerdasan emosi me-

menurut Goleman terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1. *Self awareness*/Kesadaran diri, meliputi (pemahaman akan) keadaan emosi diri, penilaian pribadi, dan percaya diri.
2. *Self Regulation*/Pengaturan diri; meliputi pengendalian diri, dapat dipercaya, waspada adaptif, dan inovatif.
3. *Motivation*/Motivasi meliputi dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif dan optimis.
4. *Empathy*/Empati meliputi memahami orang lain, pelayanan, mengembangkan orang lain, mengatasi keragaman, dan kesadaran politis.
5. *Social skills*/Keterampilan sosial meliputi pengaruh, komunikasi, kepemimpinan, katalisator perubahan, manajemen konflik, pengikat jaringan, kolaborasi dan kooperasi serta kerja tim.

Sesuai dengan definisi tersebut, orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik adalah orang yang memiliki nilai tinggi untuk kelima komponen tersebut. Bila kita mengaitkan dengan pemeriksa/auditor, seorang auditor yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi khususnya dalam komponen *self-regulation* maka auditor tersebut akan dapat memilah dengan baik apa yang dapat dilakukannya dan apa yang tidak, misalnya terkait gratifikasi dari *auditee*, sehingga auditor ini akan memiliki integritas dan independensi yang baik. Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Kusuma (2011) bahwa pengendalian diri/*self regulation*, motivasi dan keterampilan sosial berpengaruh signifikan terhadap auditor dalam pengambilan keputusan.

Untuk menumbuhkan perilaku yang mencerminkan kecerdasan emosi yang baik dalam keseharian kita di tempat kerja pada era revolusi industri 4.0 ini, kita butuh pemahaman bahwa:

1. Meskipun sekarang jaman teknologi tinggi, dalam berinteraksi tetap membutuhkan sentuhan manusia;

2. IQ penting, namun tekad/kegigihan/ Grit (yang terdiri dari semangat dan ketekunan) adalah lebih penting;
3. Sentuhan emosi lebih dari sekadar usaha dan hasil.

Hal ini bisa diterapkan dalam komunikasi keseharian kita, misalnya dengan pemahaman bahwa pimpinan yang merupakan gen X belum terlalu tergantung dengan teknologi, maka sebagai *follower*/pengikut yang merupakan Gen Y, Z, atau bahkan Alpha, untuk berkomunikasi dengan pimpinan selain melalui *email*, *WhatsApp*, juga dilengkapi dengan tatap muka. Dengan adanya tatap muka, pimpinan dari Gen X mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dari pesan elektronik yang dikirimkan. Selain itu terkait penyelesaian tugas, tidak perlu bergantung dengan kecerdasan, namun lebih penting *follower*/pengikut untuk memiliki tekad/kegigihan terkait usaha dalam pencapaian usaha tim. Dan yang paling penting, sentuhan emosi akan menjadi komponen yang luar biasa dalam membangun tim, di luar upaya pemenuhan tugas dan juga *output* yang dihasilkan. Ada *quotes* yang sangat baik untuk menggambarkan pentingnya kegigihan dan sentuhan emosi;

"You don't have to be GREAT to start. You have to START, to be great."

Seseorang menjadi hebat/*great* adalah karena orang tersebut memiliki kegigihan dan keberanian untuk memulai. Dan hal ini bukan hanya terkait upaya/usaha, namun lebih pada adanya *mindset* untuk bertumbuh (*Growth Mindset*). Orang-orang dengan *growth mindset* saat melakukan pekerjaannya, tidak akan mudah menyerah. Meskipun memiliki usaha yang kuat, namun orang-orang dengan *growth mindset* akan berani untuk keluar dari *comfort zone*-nya untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang perlu menjadi pegangan dan motivasi yang kuat untuk memulai langkah pindah dari *comfort zone* adalah ketahu "Why" pribadi. Apa alasan anda untuk mendapatkan hasil

yang lebih baik, sehingga Anda harus keluar dari zona nyaman Anda.

Mindset bertumbuh adalah salah satu cerminan sikap yang dilahirkan dari kecerdasan emosi yang tinggi. Seseorang yang memahami emosi-emosinya, belajar dari pengalaman hidupnya, dan memiliki tekad untuk terus maju, merupakan cerminan pemilik dari *mindset* yang berkembang. *Growth mindset* tersebut yang sangat berharga untuk dimiliki seseorang di tempat kerja. *Growth mindset* bisa dijabarkan sebagai *mindset* yang meliputi *gairah/passion*, *vision/visi*, dan *mission/misi*. *Gairah/passion* adalah rasa cinta dan antusiasme pada suatu bidang yang membuat seseorang mampu bertahan dan rela berjuang melakukan sesuatu. *Visi* adalah hal yang ingin dicapai di masa mendatang, dapat dibayangkan, dan mendorong kita untuk berusaha, sedangkan *misi* adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai misi.

Komponen lain kecerdasan emosi yang banyak berhubungan dengan dunia kerja adalah motivasi. Motivasi adalah kebutuhan atau keinginan yang menyebabkan seseorang bertindak. Motivasi terbagi 2, intrinsik dan ekstrinsik. Sebagai contoh, motivasi ekstrinsik di dunia kerja adalah promosi, sanksi, uang/gaji/tunjangan, *reward*/penghargaan, pujian. Sedangkan untuk motivasi intrinsik contoh dalam konteks dunia kerja adalah; minat, kesenangan, keingintahuan dan harga diri. Ketika seseorang memiliki motivasi intrinsik yang tinggi dia mampu mempengaruhi orang lain secara *impactful*, dibandingkan motivasi ekstrinsik.

Perilaku-perilaku apa yang menggambarkan kecerdasan emosi di tempat kerja? Berikut adalah beberapa hal yang dapat diinvestasikan oleh *follower* bagi timnya; memberikan kepercayaan, menampilkan "nilai" positif, menghadirkan ide, keberanian untuk berbuat dan berbicara, upaya untuk belajar, gairah, peka terhadap perubahan, belajar dari kesalahan,



menjadi dan menghadirkan bukti keberhasilan, dan menjadi tangguh atau “No Baper”. Kemudian perilaku yang mencerminkan kecerdasan emosi dan menjadi investasi dalam membangun tim yang solid dari seorang pemimpin adalah menyediakan waktu untuk

followernya, melakukan upaya yang perlu dilakukan, mengembangkan kecakapan timnya, memiliki integritas, dan memberikan ruang bagi *follower* untuk belajar dari kesalahannya.

Bagaimana agar dapat menampilkan perilaku-perilaku yang men-

cerminkan kecerdasan emosi yang baik tersebut? Kembali, komunikasi adalah kuncinya. Bagaimana agar bisa berkomunikasi dengan baik? Apakah kita perlu memiliki penuturan yang hebat? Ternyata tidak. Komponen kemampuan berkomunikasi 7 persen adalah kata, 38 persen kejelasan suara, sementara 55 persen justru komunikasi non verbal. Jadi jika lawan bicara kurang paham saat berkomunikasi dengan kita, maka perjelas suara dan gunakan komunikasi non verbal yang lebih kuat. Misalnya saja senyum! Ekspresi wajah tersenyum memudahkan lawan bicara untuk menjadi nyaman dengan penutur pesan, sehingga efektifitas tersampainya pesan menjadi lebih tinggi.

Terkait adanya perbedaan gaya komunikasi antar generasi yang memiliki risiko timbulnya salah komunikasi bahkan sampai salah persepsi, berikut beberapa tips untuk berkomunikasi dengan generasi-generasi yang berbeda di tempat kerja:

TIPS BERKOMUNIKASI GEN X (LEADER) KEPADA GEN Y (ANGGOTA TIM)

- Jangan hanya memerintah, tetapi juga terlibatlah.
- Jangan mendikte; jelaskanlah.
- Berikan mereka kesempatan untuk menyuarakan opininya.
- Sampaikan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Anda untuk membuat keputusan.
- Berikan penjelasan mengapa (*why*) untuk membantu mereka mengambil tindakan.
- Tingkatkan frekuensi komunikasi.

TIPS BERKOMUNIKASI GEN Y KEPADA GEN X

- Perhatikan *timing*; kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan sesuatu.
- Perhatikan sopan santun & etika dalam berkomunikasi.
- Mencoba berempati dan berusaha memahami sudut pandang mereka.
- Jangan keras kepala.
- Bicara tatap muka seringkali lebih disukai dibandingkan dengan komunikasi digital.
- Jangan terlalu mengandalkan *chat* dan *email*.
- Jangan mengirimkan *chat/email* yang berpotensi menimbulkan reaksi emosional.

Perlu diingat kejadian apapun merupakan stimulus yang netral, yang berbeda adalah respons kita menghadapi stimulus tersebut. Bagaimana agar kita bisa merespon segala stimulus dengan respon terbaik? Yang pertama, kita perlu belajar mengelola stres (*stress management*). Dan apapun yang terjadi persepsi diri Anda baik-baik saja begitupun lawan bicara Anda, singkatnya; “I’m ok, You’re Ok”! Misalnya ada tugas atau arahan dari pimpinan yang sangat banyak dan tidak mudah dilaksanakan, yang pertama Anda perlu lakukan adalah persepsi bahwa setiap stimulus itu netral, dan An-

da mempersepsi diri Anda dalam keadaan ok, dan begitupun pimpinan Anda juga ok. Setelah itu Anda dapat memperjelas arahan, mencari data yang dibutuhkan agar tugas tersebut bisa diselesaikan. Dengan begitu stres Anda menjadi bernilai positif dan justru menjadi dorongan yang tepat dalam penyelesaian tugas. Dengan motivasi dan *soft skill* yang memadai, maka Anda akan mencapai performansi optimal di tempat kerja. Dan bagaimana agar motivasi dan *soft skill* tersebut terus terjaga baik? maka yang perlu dilakukan adalah KEY “Keep Educating Yourself”! ●

Teknologi telah membantu peningkatan kualitas pengamanan dan ketertiban di BPK.

Perkuat Pengamanan dengan Teknologi



■ Teknologi *face identification* pada akses masuk gedung BPK.

Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merupakan objek vital yang perlu mendapatkan pengamanan tinggi. Oleh karena itu, Bidang Pengamanan yang berada di bawah naungan Biro Umum BPK terus meningkatkan pengamanan. Salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Kepala Biro Umum BPK Sudarminto Eko Putra mengatakan, pihaknya telah

mengembangkan teknologi keamanan di gerbang masuk menuju BPK dengan menggunakan kartu akses. "Jadi kalau teman-teman tidak memiliki kartu akses mereka tidak bisa masuk, baik di pintu barat maupun pintu timur," ujarnya.

Sistem keamanan itu ditujukan untuk para pegawai di lingkungan BPK. Khusus untuk tamu, telah disiapkan area parkir khusus tanpa perlu menggunakan kartu akses. Hal ini, kata Eko, bertujuan menertibkan dan mendata kendaraan yang masuk ke kompleks



■ Kepala Biro Umum BPK, Sudarminto Eko Putra

Kantor Pusat BPK.

"Jadi, kalau karyawan tidak bawa *nametag*-nya dia tidak bisa parkir di lingkungan BPK," kata Eko.

Eko mengatakan, teknologi telah membantu peningkatan kualitas pengamanan dan juga ketertiban di BPK. Dia menyebut, saat ini orang tidak bisa secara sembarangan masuk ke BPK.

Salah satu pekerjaan yang sedang direncanakan adalah membuat jalur baru untuk pejalan kaki. Nantinya jalur baru tersebut akan didesain untuk bisa semakin meningkatkan pengawasan bagian pengamanan.

Selain itu, menara utama di Kantor Pusat BPK sudah dilengkapi dengan pendeteksi *x-ray*. Alat itu pun semakin memudahkan bagian pengamanan untuk mengetahui barang bawaan dari para tamu.



■ Gerbang keluar masuk mobil harus menggunakan kartu akses.



■ Pendeteksi x-ray pada lobi gedung tower BPK.

Biro Umum BPK juga sudah menerapkan teknologi pengenalan wajah atau *face identification*. Menurut Eko, dengan dukungan teknologi tersebut, tamu yang berkunjung ke BPK sudah tidak memerlukan kartu akses. Meski begitu, kartu akses masih diperlukan untuk bisa menggunakan lift di menara utama.

Eko menyampaikan, tamu yang ingin berkunjung ke pejabat di menara utama BPK terlebih dahulu harus melewati perekaman wajah. Hal itu kemudian akan dicocokkan dengan data identitas dari KTP tamu tersebut. Bagian penerima tamu kemudian memberikan kartu akses sesuai tujuan tamu tersebut.

“Saya kira ini memang sedikit membuat ketidaknyamanan tapi ini sangat penting untuk keamanan karena dokumen-dokumen yang ada di BPK sangat penting sekali,” kata Eko.

Ke depannya, Eko mengatakan, teknologi tersebut akan dikembangkan untuk merekam absensi pegawai BPK. Dia menjelaskan, Biro Umum sedang bekerja sama dengan Biro Teknologi dan Informasi (TI) untuk menyiapkan server yang mencukupi kebutuhan data keamanan dan juga data SDM.

Apabila hal itu terwujud, ke depannya pegawai hanya perlu memindai wajahnya untuk melakukan absen. “Ini termasuk untuk menjaga kedisiplinan juga. Jadi, pegawai akan sulit untuk mengakali absen,” kata Eko.

Bagian Pengamanan juga sedang



■ Teknologi *face identification*.

melakukan digitalisasi *handy-talky* (HT). Dia menyebut, proses migrasi dari analog menjadi digital itu dapat mempermudah komunikasi dan koordinasi staf pengamanan di lapangan.

Eko menjelaskan, selain mengamankan Kantor Pusat, Bagian Pengamanan juga memiliki tugas di beberapa kompleks perumahan pejabat BPK yang tersebar di Ibu Kota dan sekitarnya. “Dengan adanya HT digital kami bisa memantau seluruh bagian keamanan yang bertugas di rumah dinas. Kami sedang mengurus frekuensinya apabila disetujui akan kami implementasikan segera,” kata Eko.

Demonstrasi mahasiswa menolak

revisi undang-undang KPK dan RCUHP pada September tahun lalu juga menjadi momen penting bagi tim pengamanan BPK. Eko mengatakan, tim pengamanan berhasil menunjukkan kedisiplinan tinggi. “*Alhamdulillah*, massa tidak sampai merangsek ke dalam. Itu bisa kami tahan dan tidak ada kehilangan apa pun di BPK,” kata Eko.

BPK pun terus berupaya meningkatkan peralatan keamanan. Salah satu yang diperkuat yakni tameng, tongkat, dan sejumlah peralatan lain. “Kebetulan kami ini dekat dengan pusat demonstrasi. Terkadang ada oknum yang suka berbuat onar jadi kita juga perlu meningkatkan kehati-hatian,” kata Eko.

Pada aksi demonstrasi besar tahun lalu, tim pengamanan BPK juga turut didampingi unsur pimpinan. Saat itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna yang masih menjabat Anggota I BPK ikut memantau hingga dini hari. “Sebetulnya di momen itu tim pengamanan cukup bangga dan bersemangat karena unsur pimpinan hadir,” ujarnya.

Eko menambahkan, saat ini BPK sudah memiliki teknologi CCTV yang canggih. Salah satu CCTV itu dipasang di menara utama BPK. Kamera itu bisa memantau pergerakan massa salah satunya, dari arah Kompleks Parlemen, Senayan.

“Kami tidak perlu repot-repot bertanya apakah sudah ada massa atau belum. Dari CCTV itu kami sudah bisa memantau pergerakan massa,” kata Eko. ●

Randang Tigoka

Rendang Kemasan yang Mendunia

Randang Tigoka sudah pernah dibawa dan dikirim ke lima benua.

Novita Saseria awalnya belum berpikir dapat meraup pundi-pundi keuntungan dari bisnis kuliner khas Minang. Novita sebelumnya sudah sempat mendengar adanya bisnis rendang kemasan. BPK Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) itu baru melihat peluang bisnis itu setelah menerima pesanan rendang pertamanya.

Novita mengisahkan, salah seorang kerabatnya dari luar Padang, memesan rendang kepadanya. Dia pun menawarkan rendang buatan keluarganya kepada kerabatnya tersebut.

"Saya tawari apakah mau rendang buatan keluarga kami? Teman saya setuju dan itu adalah pesanan pertama yang saya terima," kata Novita kepada *Warta Pemeriksa*, beberapa waktu lalu.

Setelah itu, Novita pun terpikir untuk menggeluti bisnis rendang kemasan secara lebih serius. Dia kemudian menetapkan nama untuk produknya, yakni Randang Tigoka. Kata randang dipilihnya untuk menunjukkan pe-lafalan rendang di kalangan orang Minang.

Novita mengembangkan bisnisnya melalui media sosial. Beberapa keluarga dan karyawan turut membantu bisnis Randang Tigoka. Ia juga membuka sejumlah program pemberdayaan dengan beberapa mahasiswa, baik da-



lam bentuk penelitian maupun proyek wirausaha. Dia mengaku, seluruh kegiatan operasional telah dibagi dan dijalankan oleh karyawannya. "Dengan SOP (standar operasi dan prosedur) yang sudah saya buat, sehingga tidak mengganggu jadwal kerja rutin saya," kata Novita.

Ia menekankan, produk Randang Tigoka tidak menggunakan bahan pengawet dan penguat rasa. "Walaupun tidak menggunakan bahan pengawet, randang tigoka tetap tahan lama karena proses masak dan pengemasannya," kata Novita.





Dikisahkan Novita, resep Randang Tigoka adalah resep turun temurun di lingkungan keluarganya. Menurutnya, bumbu-bumbu yang diperlukan juga mudah didapatkan. "Karena ini adalah resep turun temurun sejak zaman dahulu sebelum beredarnya bahan pengawet, maka Randang Tigoka bisa tahan berbulan-bulan tanpa pengawet," kata Novita.

Salah satu target pasar Randang Tigoka adalah *traveler* atau pecinta wisata. Dia pun mengusung tagar #randangjalanjalan dalam promosinya di media sosial.

Randang Tigoka dikemas untuk menjadi teman perjalanan para *traveler*. Selain rasa yang sudah cocok dengan lidah Indonesia, kemasan dan jaminan halal produknya juga menjadi alasan bagi para konsumen untuk membawa Randang Tigoka ke berbagai tujuan di dunia. "Alhamdulillah, Randang Tigoka sudah pernah dibawa dan dikirim ke lima benua,"



kata Novita.

Novita mengakui perjalanan bisnisnya turut menghadapi tantangan. Tantangan itu, antara lain, mencari sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan, adanya pelemahan daya beli masyarakat, dan juga regulasi bisnis.

Ia pernah mengalami beberapa kegagalan dalam bisnisnya. Hal itu kemudian dicatat untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang.

"Walaupun tidak ada jaminan berhasil, tapi catatan kegagalan bisa meminimalisir kemungkinan kegagalan

berikutnya," kata Novita.

Menurut Novita, berbagai bentuk kegagalan adalah hal yang lumrah terjadi dalam bisnis. Dia menilai, hal itu tidak perlu menjadi ketakutan seseorang yang ingin memulai usaha. "Tipsnya, jika ingin memulai suatu usaha, mulai saja," kata Novita.

Novita berharap Randang Tigoka bisa berdaya dan memberi kontribusi untuk masyarakat. Dia ingin Randang Tigoka memberikan solusi untuk para pelanggan yang kesulitan mencari makanan kemasan yang sesuai dengan selera, sehat, dan halal. ●



BPK Perkuat Upaya Pencegahan



■ Ketua BPK membuka FGD terkait gugatan atas perbuatan melanggar hukum.

FGD dilatarbelakangi adanya pihak-pihak yang memperlumahkan prosedur pemeriksaan maupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan mengajukan gugatan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) terkait gugatan atas perbuatan melanggar hukum, di kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (12/12). FGD tersebut diadakan untuk memberikan pemahaman dan membahas tentang gugatan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

Pelaksanaan FGD dilatarbelakangi adanya pihak-pihak yang memperlumahkan prosedur pemeriksaan maupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan mengajukan gugatan. BPK mengundang Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Supandi, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Zaid Umar Bobsaid, para praktisi hukum serta advokat sebagai narasumber. Adapun narasumber dari internal BPK adalah Kaditama Binbangkum BPK Blucer W Rajagukguk.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna yang hadir dalam FGD tersebut mengatakan, BPK merupakan lembaga negara yang hasil keputusannya bersifat final dan mengikat. Namun demikian, Agung menilai hal tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk memper-

baiki proses penegakan hukum.

Agung mengatakan, BPK turut menjadi bagian dalam proses penegakan hukum melalui proses pemeriksaan investigasi dan penghitungan kerugian negara. Agung pun menyatakan BPK ingin memperkuat upaya pencegahan perbuatan melawan hukum di suatu instansi.

"Ke depan arahnya adalah kita melakukan upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap perbuatan kecurangan atau yang dikenal dengan korupsi. Sehingga orang tidak langsung dikriminalisasi, tetapi diberikan kesempatan agar melihat di mana yang dapat diperbaiki," kata Agung se usai menghadiri FGD.

Agung menambahkan, upaya pencegahan sebetulnya sudah dilakukan oleh BPK. Suatu entitas yang diperiksa, diberikan waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

"Apabila ada kerugian negara, maka dalam jangka waktu tersebut sebenarnya bisa dipulihkan. Dengan demikian, tidak langsung dilakukan upaya penegakan hukum," katanya. ●



■ Para peserta FGD dari BPK, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, para praktisi hukum, serta advokat.

Penegakan Kode Etik Butuh Dukungan Semua Pihak



■ Para narasumber Workshop Implementasi Kode Etik BPK.



■ Penandatanganan pernyataan komitmen peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Ketua BPK berharap pemerintah daerah sebagai entitas BPK dapat saling menjaga dan saling memperkuat penegakan kode etik BPK.

Penegakan kode etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memerlukan dukungan dari semua pihak. Bukan hanya dari internal BPK, melainkan juga dari para *stakeholder*.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, hal tersebut dilakukan agar nilai-nilai dasar BPK, yakni Independensi, Integritas dan Profesionalisme dapat terinternalisasi dengan baik.

"Bukan karena khawatir dengan proses penindakan atau ancaman sanksi etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE), tapi karena semua pihak butuh untuk menegakkan nilai-nilai dasar tersebut agar keuangan negara/daerah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara, yakni mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar Ketua BPK dalam sambutannya pada *Workshop* Implementasi Kode Etik BPK, di Kupang, Jumat (13/12).

Workshop tersebut dihadiri Anggo-

ta MKKE Rusmin, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Inspektur Utama BPK Ida Sundari, para bupati dan walikota, ketua DPRD, pelaksana di lingkungan BPK, serta pegawai di lingkungan pemerintah daerah se-NTT.

Ketua BPK berharap pemerintah daerah sebagai entitas BPK dapat saling menjaga dan saling memperkuat penegakan kode etik BPK. Agung pun berharap dengan adanya penyelenggaraan *workshop*, entitas dapat memahami apa yang harus dilakukan apabila menemukan ada pelanggaran kode etik.

"*Workshop* ini penting untuk memahami Kode Etik BPK dan majelis yang diberi tugas untuk melakukan penegakannya, yaitu Majelis Kehormatan Kode Etik BPK, dalam rangka turut mewujudkan suasana kondusif bagi pelaksanaan pemeriksaan," jelasnya.

Selain *workshop*, pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen antara para inspektur daerah dengan para kepala daerah se-Provinsi NTT. Para inspektur daerah berkomitmen untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pengambilan sumpah

Ketua BPK Agung Firman Sampurna memandu pengambilan sumpah Ketua dan Anggota MKKE dari Unsur BPK di kantor pusat BPK, Jakarta, Rabu (8/1). Pengambilan sumpah dilaksanakan



■ Penandatanganan berita acara Sumpah Anggota MKKE.

berdasarkan Keputusan BPK Nomor 11/K/I-XIII.2/12/2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota MKKE BPK Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dari Unsur BPK dan Pengangkatan Anggota MKKE BPK Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dari Unsur BPK.

Adapun yang diambil sumpahnya sebagai Anggota MKKE BPK dari Unsur BPK adalah Achsanul Qosasi (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK) dan Hendra Susanto (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK).

Pengambilan sumpah yang berlangsung khidmat ini disaksikan oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan para Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK. Turut hadir dalam kesempatan ini Anggota MKKE Jusuf Halim serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPK. Usai pengambilan sumpah jabatan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah Anggota MKKE BPK dan disaksikan oleh Ketua BPK. ●

BPK-Komisi XI DPR Bahas Risiko Pengelolaan APBN

FGD ini ditujukan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin (16/12). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna.

Dalam sambutannya, Ketua BPK mengatakan bahwa FGD ini ditujukan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. FGD dengan tema "Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan



■ Ketua BPK menjelaskan identifikasi risiko pengelolaan keuangan negara tahun 2019.

Belanja Negara (APBN) Tahun 2019" turut dihadiri para Auditor Utama Keuangan Negara BPK.

FGD membahas tentang pemahaman atas masalah dalam pengelolaan APBN sampai dengan tahun 2018. Selain itu, juga dipaparkan mengenai identifikasi risiko pengelolaan keuangan negara pada tahun 2019.

"Jadi dasarnya adalah hasil pemeriksaan kami sebelumnya dan identifikasi terhadap risiko apa yang akan kami hadapi pada saat BPK melakukan pemeriksaan pada tahun 2019," ujar Ketua BPK yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan Anggota II BPK Pius Lustrilantang.

Melalui FGD tersebut, Ketua BPK berharap mendapat masukan dari Komisi XI sebagai *stakeholder* utama atas perkembangan pengelolaan keuangan negara. "Kami berharap mendapatkan informasi yang lebih detail tentang bagaimana risiko tersebut dihadapi atau kita kelola," ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Ketua BPK menyampaikan bahwa FGD ini dapat mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya Komisi XI serta meningkatkan manfaat dan relevansi hasil pemeriksaan BPK agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. ●



■ Ketua BPK berbincang bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI.

Ketua BPK Tekankan Pentingnya Pengelolaan Risiko

BPK telah membuat kebijakan yaitu penguatan dalam penilaian risiko atau *risk assessment* yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan risiko.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 atas kementerian di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV pada Senin (6/1). Dalam sambutannya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menekankan, pengelolaan risiko atau *risk management* merupakan hal penting untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan negara. Ketua BPK bahkan menyebutkan, kasus yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga menyangkut masalah pada sisi *risk management*.

"Kasus Jiwasraya, selain kasus pidana dan kriminal, ada masalah di dalamnya. Ada kasus terkait *risk management*," kata Ketua BPK di Kantor Pusat BPK, Jakarta pada Senin (6/1).

BPK telah membuat kebijakan yaitu penguatan dalam penilaian risiko atau *risk assessment* yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan risiko.

"*Risk assessment* terdiri dari lima hal, tetapi dua hal yang utama adalah Matrik Risiko Bisnis atau *Business Risk Matrix* dan Matrik Penilaian Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assessment Matrix*. Dua hal tersebut penting dilakukan oleh entitas yang diperiksa dan juga dilakukan oleh pemeriksa sebagai bagian dari *risk assessment* dalam melaksanakan pemeriksaan" ujar Ketua BPK.



■ Ketua BPK bersama para menteri selaku pimpinan entitas di Lingkungan AKN IV.

Matrik risiko bisnis adalah suatu informasi tentang seluruh kondisi atau peristiwa yang memiliki risiko signifikan dan dapat mengakibatkan entitas yang diperiksa gagal dalam mencapai tujuan. Risiko kegagalan tersebut dapat berpengaruh dalam laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Matrik Penilaian Risiko Kecurangan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendeteksi adanya risiko kecurangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji dalam laporan keuangan. Jenis kecurangan ada tiga kategori yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan penyajian yang menyesatkan.

Selain Ketua BPK dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, turut hadir dalam acara tersebut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun dalam sambutannya mengatakan, opini terhadap kementerian di lingkungan AKN IV relatif cukup bagus. Dia menyampaikan, lima dari enam kementerian telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan satu kementerian memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Akan tetapi, dia mengingatkan, opini atas suatu laporan keuangan tidak statis, bisa naik dan juga bisa turun.

Oleh karena itu, BPK mengharapkan kementerian yang telah memperoleh opini WTP mempertahankannya dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari BPK untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan selalu berinovasi untuk mengelola keuangan negara menjadi lebih baik.

"Selain itu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan selalu dijaga agar setiap rupiah pengeluaran negara dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV. ●



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kini hadir

e-PPfD

**permohonan informasi dan
menyampaikan pengaduan
semakin mudah**



e-ppid.bpk.go.id

Pemeriksaan BUMN di Bawah Naungan Kemenkeu



■ Auditor Utama II BPK, Laode Nusriadi

Pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan menyoroti proses *assessment* yang dilakukan terhadap kelayakan calon debitur dan kegiatan atau proyek yang akan dibiayai.

Salah satu tugas Auditorat Keuangan Negara (AKN) II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan pembinaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BUMN tersebut adalah: PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat; PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur, bertujuan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan de-

ngan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral; PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang penjaminan proyek infrastruktur yang pembiayaannya melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU); dan PT Geo Dipa Energi (Persero) bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan sumber daya panas bumi meliputi eksplorasi dan pengembangan produksi uap dan pembangkit listrik, menjual tenaga listrik, tenaga uap serta mineral ikutan.

Selain itu, terdapat satu entitas pemeriksaan yang merupakan kekayaan negara dipisahkan tetapi bukan berbentuk BUMN, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang juga berada di bawah pembinaan Kemenkeu. LPEI bergerak di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi dalam rangka meningkatkan ekspor nasional.

Auditor Utama KN II BPK, Laode Nusriadi, menyampaikan proses pemeriksaan untuk entitas-entitas tersebut dimulai dari pengajuan usulan dan penyusunan program, pelaksanaan hingga pelaporan hasil pemeriksaan.

“Pengajuan usulan dan program pemeriksaan didasarkan pada hasil penilaian risiko pemeriksaan termasuk memperhatikan kebijakan pemeriksaan BPK,” kata Laode kepada *Warta Pemeriksa*.

Laode mengatakan, profil entitas perlu senantiasa dimutakhirkan dari waktu ke waktu, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan arah pemeriksaan. Informasi mengenai hasil evaluasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), perkembangan usaha yang tercermin dari capaian indikator-indikator seperti profil risiko entitas, tata kelola (*governance*), tingkat permoldan dan rentabilitas yang terkait dengan tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, serta isu-isu yang menjadi sorotan masyarakat, dapat menjadi masukan dalam penilaian risiko pemeriksaan.

Menurut Laode, lembaga-lembaga yang berada di bawah pembinaan Kemenkeu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meski, ujar Laode, *core business* dari SMI, SMF, PII dan LPEI hampir sama yaitu terkait sektor pembiayaan.

Dia mengatakan, secara umum, pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan menyoroti proses *assessment* terhadap kelayakan calon debitur dan kegiatan atau proyek yang akan dibiayai. Sebelum memberikan pembiayaan, perusahaan melakukan analisis kelayakan secara umum yang disesuaikan dengan mandat masing-masing lembaga. Misalnya, pembiayaan PT SMI diarahkan pada kesesuaian jenis atau sektor infrastruktur tertentu, pembiayaan LPEI diarahkan pada justifikasi ekspor, pembiayaan PT SMF diarahkan pada lembaga penyalur

kredit perumahan, dan penjaminan PT PII diarahkan pada pemberian jaminan kewajiban keuangan suatu proyek yang pembiayaannya melalui skema KPBU.

“Sudah ada aturan mainnya dan kriterianya, yang mengacu pada prinsip kehati-hatian mengenai bagaimana seharusnya proses persetujuan atas usulan pembiayaan mulai dari penilaian kapabilitas calon debitur dan prospek kegiatan atau proyek yang akan dibiayai hingga penilaian atas kewajaran nilai agunan, pemeriksaan BPK akan mengikuti prosedur itu,” kata Laode.

Dari proses itu, BPK akan memastikan kesesuaiannya dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku dan standar penilaian terkait agunan. “Jangan sampai tidak layak dibiayai tapi dilayak-layakkan. Praktik seperti itu kerap berpotensi mengakibatkan kredit macet yang sulit untuk dipulihkan, bahkan setelah direstrukturisasi pun bisa kembali macet,” kata Laode.

Apabila kredit sudah disetujui, selanjutnya BPK menyoroti kecukupan pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian pembiayaan dan implementasinya, yang meliputi pengikatan agunan, proses pencairan pembiayaan dan penggunaan dananya, *monitoring* proses pelaksanaan kegiatan atau pembangunan proyek, pemenuhan *covenant*, sumber dana pelunasan pembiayaan dan ketepatan waktu pembayaran angsuran dan bunga.

“Itu siklus normalnya. Tapi, dalam pemeriksaan kita bisa melakukan *short cut* dengan memulai berdasarkan masalah yang ada,” kata Laode.

Dia mengatakan, *outstanding* pembiayaan umumnya dikelompokkan menjadi kategori lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurutnya, kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet sudah dapat digolongkan sebagai *non performing loan* (NPL). Berdasarkan *best practices*, NPL merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat risiko



perusahaan pembiayaan. Namun demikian perlu dilihat juga kewajaran proses kategorisasi tersebut pada masing-masing perusahaan pembiayaan karena bisa berbeda dengan praktik yang lazim di perbankan. Idealnya, perhitungan NPL memperhatikan 3 aspek yaitu aspek pembayaran, kinerja keuangan, dan kinerja usaha debitur.

Semakin tinggi porsi NPL dibandingkan *outstanding* pembiayaan mencerminkan adanya permasalahan, ini bisa menjadi titik awal pemeriksaan.

“Kalau yang masih lancar itu sekali-kali bisa kita soroti dari aspek risikonya misalnya apakah pembiayaan tersebut masih *secure* dalam arti memiliki agunan yang cukup dan diikat sempurna. Tapi kalau sudah masuk dalam kategori NPL itu sudah pasti masalah,” kata Laode.

Menurutnya, dari pembiayaan bermasalah itu, BPK akan menelusuri prosesnya mundur ke belakang sampai ke persetujuan pemberian pembiayaan dan kecukupan agunan. “Jadi, ada atau tidak ketentuan yang dilanggar dalam tiap tahapan pembiayaan, ada atau tidak penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan, ada atau tidak indikasi *fraud*? Karena bisa jadi memang dari awal, kegiatan atau proyek tersebut tidak layak atau debitur tidak punya kapabilitas yang memadai untuk memperoleh pembiayaan. Hal itu bisa jadi temuan pemeriksaan,” kata Laode.

Selain itu, ujar Laode, pemeriksaan

juga bisa dilakukan dengan menyoroti penggunaan dana tambahan Penyer-taan Modal Negara (PMN) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Be-lanja Negara (APBN). Dia mengatakan, PMN diberikan untuk tujuan tertentu melalui anggaran pembiayaan yang dialokasikan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

PMN bisa diberikan dalam bentuk tunai, atau berasal dari konversi utang BUMN kepada pemerintah, atau berupa aset tertentu milik kementerian/ lembaga yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMN.

“PMN umumnya diberikan untuk tujuan pengembangan usaha tertentu atau melaksanakan penugasan dari pemerintah. Ketika pemeriksaan, kita bandingkan saja apakah PMN ini dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang sejak awal didesain dan memberikan dampak sesuai harapan. Kalau tidak, berarti ada masalah, karena pemanfaatannya tidak sesuai tujuan pemberian PMN, atau mungkin pemanfaatannya sudah sesuai tujuan tapi tidak memberikan dampak apa-apa terhadap perkembangan usaha perusahaan,” kata Laode.

Dalam beberapa kasus, PMN yang berbentuk aset yang diserahkan oleh kementerian/ lembaga kepada BUMN, ternyata tidak memberikan manfaat bahkan menjadi beban. Karena bisa jadi aset tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan perencanaan bisnis BUMN yang bersangkutan.

Meski begitu, Laode menyampaikan, perubahan tujuan PMN belum tentu terkait *fraud*. Dia mengatakan, hal itu mungkin terjadi karena aksi korporasi yang diketahui atau disetujui organ perseroan. PMN itu dialihkan untuk tujuan lain karena prioritas perusahaan berubah seiring berjalannya waktu.

“Kebijakan untuk mengubah pemanfaatan PMN sehingga tidak sesuai tujuan awal pemberiannya, bisa jadi tepat bisa juga tidak, sehingga itu yang perlu dinilai,” kata Laode. ●

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Risiko di Lingkungan BPK



■ OLEH ABDUL LATIEF

Proses manajemen risiko meliputi komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko), penanganan risiko, serta *monitoring* dan *review*.

Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Badan Pemeriksa Keuangan, keandalan laporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPK pada dasarnya sejak lama telah melaksanakan manajemen risiko, sesuai dengan SK

Ketua BPK No. 23/K/I-XIII.2/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal. Namun pada saat itu pelaksanaannya belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Sesuai perkembangan dan sebagai paradigma baru maka dengan standar ISO 31000 manajemen risiko mempunyai fokus yang lebih luas dan dilaksanakan secara formal, terstruktur, disiplin, terintegrasi dan terdokumentasi.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko, BPK telah mengeluarkan Keputusan BPK No. 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko dan Keputusan BPK No. 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BPK yang sampai saat ini telah dilaksanakan oleh seluruh pemilik risiko.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan BPK No. 1/K-XIII.2/2/2016 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, pengelolaan manajemen risiko tersebut dilekatkan dan diintegrasikan ke dalam tugas dan fungsi satuan kerja eselon I dan eselon II sebagai satker pemilik risiko yaitu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaan risiko di lingkup tugasnya. Dan untuk level Badan pengelolaan risiko dilaksanakan oleh Satker Ditama Revbang dalam hal ini oleh Direktorat PSMK.

Pemilik risiko di lingkungan BPK meliputi eselon I sebanyak 18 satuan kerja, eselon II sebanyak 74 satker

termasuk 34 Perwakilan di 34 provinsi. Agar pengelolaan risiko yang mencakup seluruh satuan kerja tersebut lebih efektif maka diperlukan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi manajemen risiko.

Manajemen risiko merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. Dan merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Proses manajemen risiko meliputi komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko), penanganan risiko, serta *monitoring* dan *review*.

Tujuan Manajemen Risiko adalah:

- Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja organisasi.
- Mendorong manajemen untuk proaktif dan antisipatif.
- Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
- Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.
- Meningkatkan ketahanan lembaga.

Sehubungan optimalisasi penerapan proses manajemen risiko di lingkungan BPK, Biro Teknologi Informasi (TI) telah mengembangkan aplikasi manajemen risiko. Aplikasi tersebut bermanfaat untuk:

- a. Memfasilitasi kegiatan penilaian dan *monitoring* risiko untuk seluruh satuan kerja di BPK, baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan.
- b. Memudahkan dalam pengelolaan manajemen risiko.
- c. Ketersediaan informasi profil dan peta risiko setiap saat bagi pemilik risiko pada level Badan dan level pelaksana BPK.
- d. Mendorong konsistensi implementasi siklus manajemen risiko.
- e. Memudahkan koordinasi antar satker dalam penanganan risiko.
- f. Sebagai alat inisiasi identifikasi risiko bagi pemilik risiko.

Aplikasi manajemen risiko merupakan salah satu bagian dari aplikasi perencanaan strategis dan manajemen kinerja (PRISMA). Aplikasi manajemen risiko merupakan aplikasi berbasis *web* dengan alamat <https://prisma.bpk.go.id>. Aplikasi ini dapat dengan mudah diakses dari mana saja dan kapan saja, serta dapat dijalankan tanpa harus melakukan instalasi terlebih dahulu.

Untuk memastikan keamanan data, aplikasi ini hanya dapat diakses melalui jaringan internal BPK (intranet) atau melalui jaringan publik (internet) dengan menggunakan *virtual private network* (VPN).

Fitur-Fitur Aplikasi

Secara umum, fitur-fitur aplikasi manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai fungsi masing-masing fitur:

- a. "Dashboard" berisi tentang statistik terkait kategori risiko dan area dampak untuk satuan kerja terkait;
- b. "Profil Risiko" berisi data profil risiko satuan kerja terkait berdasarkan Sasaran Strategis BPK;
- c. "Peta Risiko" menggambarkan matriks peta risiko yang termasuk dalam level kemungkinan dan level dampak untuk satuan kerja terkait;
- d. "Monitoring Risiko" berisi rekapitulasi profil risiko semua satuan kerja baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan BPK.

User dan Role Aplikasi

a. Badan

Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK adalah Komite Eksekutif Manajemen Risiko dapat memonitor profil dan peta risiko satuan kerja di BPK.

b. Eselon I

● Kaditama Revbang

Sebagai Ketua Komite Pelaksana Manajemen Risiko, Kaditama Revbang dapat memonitor profil dan peta risiko seluruh satuan kerja di BPK.

● Irtama

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan Manajemen Risiko dan pelaksanaan peran konsultasi Manajemen Risiko di lingkungan BPK, Irtama dapat memonitor profil dan peta risiko seluruh satuan kerja di BPK.

● Eselon I lainnya

Eselon I merupakan pemilik risiko satuan kerja, sehingga Eselon I dapat memonitor profil dan peta risiko pada satuan kerja dalam lingkup tugasnya.



Aplikasi manajemen risiko merupakan salah satu bagian dari aplikasi PRISMA.

c. Eselon II

● Kepala Direktorat PSMK

Kepala Direktorat PSMK adalah Kepala Koordinator Penerapan Manajemen Risiko. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Direktorat PSMK dapat memonitor profil dan peta risiko seluruh satuan kerja di BPK.

● Eselon II lainnya

Eselon II merupakan pemilik risiko satuan kerja, sehingga Eselon II dapat memonitor profil dan peta risiko pada satuan kerja dalam lingkup tugasnya.

d. Admin Manajemen Risiko

Subdirektorat PSMK II berfungsi sebagai Admin Manajemen Risiko yang memiliki *role* sebagai berikut:

- Melakukan *role inputter* dan manajer manajemen risiko untuk semua satuan kerja.
- Memonitor risiko semua satuan kerja.
- Melakukan pengaturan *user* dan *role*.

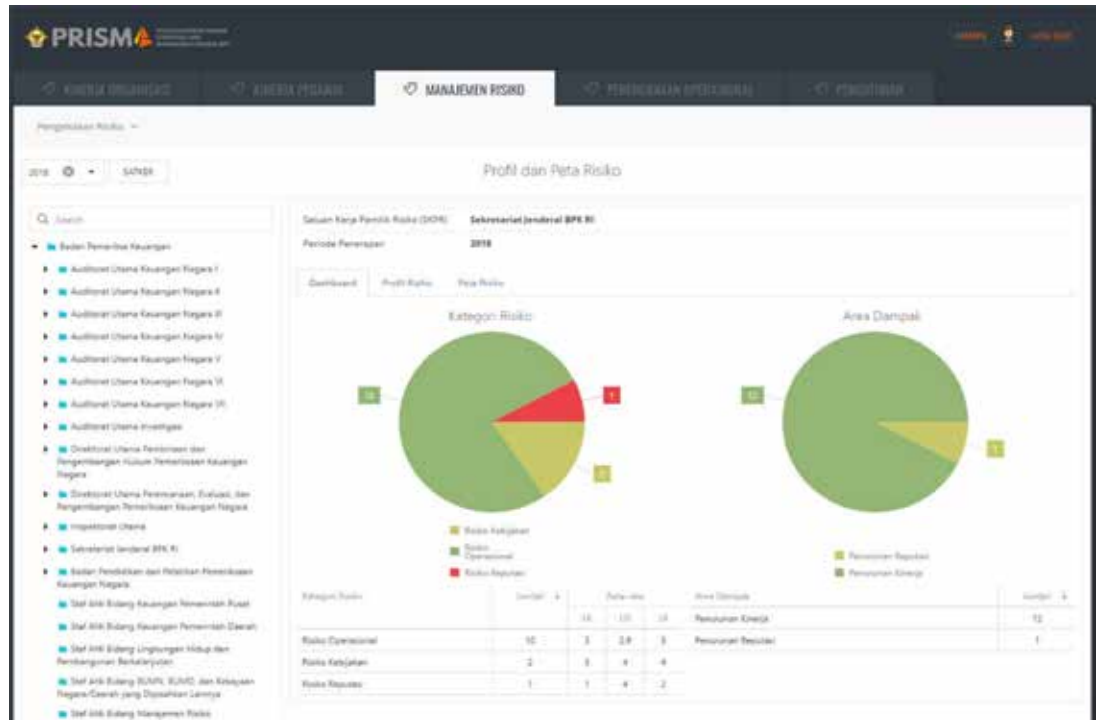
e. Manajer dan *Inputter* Manajemen Risiko

Manajer Manajemen Risiko satuan kerja eselon I dipegang oleh salah satu Eselon II dari satuan kerja yang bersangkutan. Sedangkan Manajer Risiko satuan kerja eselon II dipegang oleh salah satu Eselon III dari satuan kerja yang bersangkutan. Untuk melaksanakan tugasnya, seorang Manajer Risiko dibantu oleh seorang *inputter*.

Manajer dan *Inputter* Manajemen Risiko *role* sebagai berikut:

- Melihat Dashboard manajemen risiko satuan kerja.
- Membuat dan melihat profil risiko satuan kerja terkait.
- Melihat peta risiko satuan kerja terkait.

Screenshot Aplikasi PRISMA



Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartabpkri@gmail.com dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.

Model koordinasi tiga lapis pertahanan

Untuk menjamin implementasi dan pemanfaatan aplikasi manajemen risiko dapat dilaksanakan secara efektif maka perlu penerapan model koordinasi manajemen risiko yaitu model tiga lapis pertahanan (*three lines of defense*).

Ketiga lapis tersebut terdiri dari

- a. Lapis pertama dilaksanakan oleh manajer risiko yang mengelola risiko pada satker eselon I dan II yang diharapkan dapat memastikan bahwa penerapan kebijakan dan pemanfaatan aplikasi manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- b. Lapis kedua dilaksanakan oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yaitu oleh unit manajemen risiko sebagai koordinator penerapan manajemen risiko yaitu Dit PSMK Ditama Revbang yang melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan dan menyiapkan laporan manajemen risiko BPK Wide.
- c. Lapis ketiga dilaksanakan oleh pengawasan internal yaitu oleh Inspektorat Utama untuk mereviu dan evaluasi terhadap implementasi manajemen risiko secara keseluruhan dan memastikan bahwa kegiatan pertahanan pada lapis I dan II serta pemanfaatan aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai penutup tulisan ini dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka efektivitas penerapan aplikasi manajemen risiko maka seluruh pemilik risiko melalui manajer risiko pada level eselon 1 dan eselon 2 dan PSMK yang melakukan pengelolaan administrasi risiko pada BPK Wide, harus memastikan bahwa pengisian formulir perencanaan sampai dengan pengisian formulir monitoring melalui firmulir I s.d. Formulir V pada lampiran Pedoman Penerapan Manajemen Risiko telah masuk ke aplikasi agar Ditama Revbang dalam hal ini PSMK dan eselon I dapat mengakses data secara baik untuk kepentingan informasi dan pelaporan serta pengambilan keputusan.
- b. Selain itu dengan terbangunnya *data base* ini para pemilik risiko melalui manajer risiko dapat melakukan perencanaan pengelolaan risiko lebih tepat terutama untuk kategori risiko tinggi. Dan pada dasarnya pengembangan *software* atau sistem informasi yang berbasis *Web* adalah penting untuk *data base* profil risiko di lingkungan BPK dan masing-masing satker pemilik risiko dengan mudah dapat melakukan *updating* profil risiko secara *real time* melalui jaringan IT.
- c. Untuk menjaga penerapan kebijakan manajemen risiko yang efektif diperlukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan atas semua unsur yang terkait sesuai dengan tugas dan perannya pada lini pertahanan masing-masing. ●

“DIPLOMASI EKONOMI”

Jakarta, 8 - 11 Januari 2020



8 Januari 2020

Rapat Kerja Kementerian Luar Negeri dihadiri Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Anggota I BPK Hendra Susanto.



21 Desember 2019

Perayaan Natal diawali dengan Ibadah Natal secara Oikumene di Auditorium BPK dihadiri Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan ratusan pegawai dan keluarga pegawai BPK serta Persatuan Pasca Karya Badan Pemeriksa Keuangan RI (Pepaska) yang tergabung dalam Keluarga Besar Kristiani BPK.

2 Januari 2020

Ketua BPK Agung Firman Sampurna didampingi Kepala Badiklat PKN Hery Subowo berdialog dengan warga yang terdampak banjir di Kalibata, Jakarta Selatan.





12 Desember 2019

Anggota I BPK, Hendra Susanto bertemu dengan Duta Besar/Wakil Tetap RI pada PBB di New York, Dian Triansyah Djani untuk melakukan komunikasi audit sekaligus *exit briefing* Pemeriksaan Interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2019, Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat.



13 Januari 2020

Wakil Ketua BPK memberikan sambutan saat berziarah ke makam Prof Eddy Mulyadi Soepardi.

16 Desember 2019

Courtesy Call BPK RI dengan INTOSAI Development Initiative (IDI) dihadiri Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.



14 Desember 2019

Anggota I BPK, Hendra Susanto bersama tim pemeriksaan bertemu dengan Iwan Freddy Hari Susanto (Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington D.C) dan Marsekal Pertama TNI Alfonsius Joko Takarianto (Atase Pertahanan KBRI Washington D.C) untuk melakukan komunikasi audit interim atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Pertahanan RI tahun 2019 serta pemeriksaan atas pengadaan alutsista tahun 2018-2019 pada KBRI, ATHAN dan Perwira FMS, di Washington D.C, Amerika Serikat. Pada pertemuan ini juga dibahas mengenai tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara.



9 Januari 2020

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna memandu pengambilan sumpah Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (MKKE BPK) dari Unsur BPK di Kantor Pusat BPK



23 Desember 2019

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Eselon II, III, dan IV di Auditorium BPK, di Jakarta.



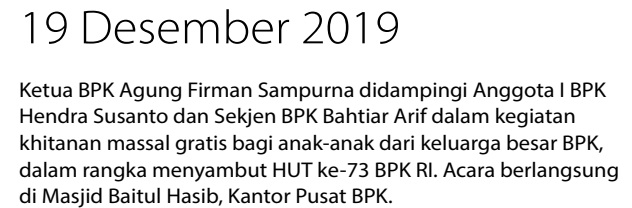
23 Desember 2019

Upacara Peringatan Hari Ibu dipimpin Irtama BPK Ida Sundari.



14 Desember 2019

Ketua BPK Agung Firman Sampurna didampingi Anggota V BPK Bahrullah Akbar turut serta dalam pertandingan sepak bola persahabatan antara BPK, Pemprov DKI Jakarta, dan Forum Komunikasi BUMD DKI Jakarta berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

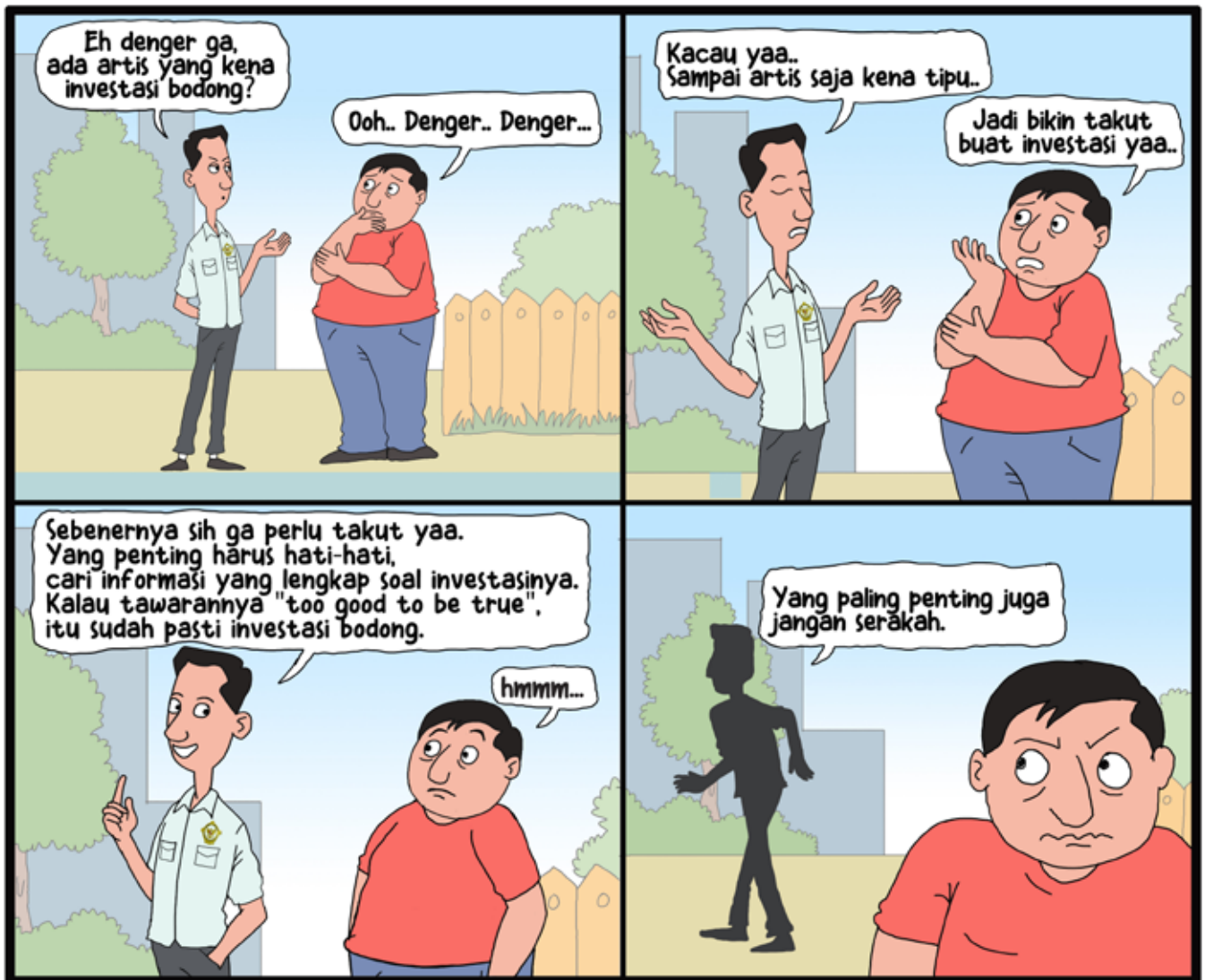


19 Desember 2019

Ketua BPK Agung Firman Sampurna didampingi Anggota I BPK Hendra Susanto dan Sekjen BPK Bahtiar Arif dalam kegiatan khitanan massal gratis bagi anak-anak dari keluarga besar BPK, dalam rangka menyambut HUT ke-73 BPK RI. Acara berlangsung di Masjid Baitul Hasib, Kantor Pusat BPK.



INVESTASI BODONG



Pertanyaan:

Di dalam majalah Warta Pemeriksa edisi November 2019, disebutkan bahwa Certified State Finance Auditor (CSFA) memiliki posisi yang istimewa, mengapa?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartabpkri@gmail.com dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

JURNALISTIK

TEMA

“Sinergi Pemeriksaan BPK Mengawal Harta Negara”

Tema khusus*:

- Pemeriksaan BPK untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (17 Sustainable Development Goals);
- Peran Audit dalam mengurangi Korupsi;
- Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
- BPK dan Wewenang Penghitungan Kerugian Negara;
- Accountability For All untuk Indonesia yang lebih baik.

*Background Informasi Tema Khusus: <http://bit.ly/2ZJnmhY>

Persyaratan Lomba

- Peserta adalah wartawan dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan kartu identitas diri;
- Peserta adalah wartawan yang bekerja di media cetak atau media online kantor berita dibuktikan dengan tanda pengenal wartawan yang dilampirkan salinannya saat mengirim karya tulis;
- Hasil karya merupakan karya orisinal yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan saduran, bukan terjemahan, non-SARA, dan tidak tergolong advertorial;
- Karya jurnalistik dimuat di media cetak atau media online periode 1 Oktober 2019 – 30 April 2020;
- Karya bisa berbentuk opini serta bentuk pemberitaan;
- Panitia diberi hak dan wewenang untuk mempublikasikan karya jurnalistik peserta lomba dengan mencantumkan nama penulisnya;
- Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kategori

Pemberitaan
di Media Cetak atau Media Online

Opini
di Media Cetak atau Media Online

Batas Pengiriman

30 April 2020

Hadiah Pemenang Lomba

masing-masing kategori

Juara I : Rp10.000.000

Juara II : Rp8.000.000

Juara III : Rp5.000.000



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pengiriman Karya Lomba

- Karya jurnalistik dikirimkan ke alamat email publikasimedia@bpk.go.id atau wartabpkri@gmail.com disertai dengan hasil scan KTP; scan Press ID; scan bukti pemuatan opini/berita di media cetak lengkap dengan keterangan edisi, hari, tanggal, halaman; link bukti pemuatan opini/berita di media online; scan lembar pernyataan orisinalitas karya (<http://bit.ly/39o8Xw2>); dengan subject email: **Lomba Karya Jurnalistik BPK 2020**;
- Karya diterima panitia **paling lambat pada 30 April 2020 pukul 15.00 WIB**. Karya lomba yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan, dianggap gugur;
- Peserta boleh mengirimkan maksimal 2 karya untuk masing-masing kategori.

DIRGAHAYU
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

75

Bersatu Padu, BPK Maju

1 JANUARI 1947 - 1 JANUARI 2020



BPK RI



@bpkriofficial



@humasbpkri.official



@bpkri



BPK RI Official